

BAPPERIDA KAB. KEBUMEN



REINSTR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen 54311
Telp/Fax. (0287) 381570 Pos-el: bappeda@kebumenkab.go.id Laman:
bappeda.kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian, serta pengembangan inovasi daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan nasional dan provinsi, serta memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode 2025–2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika pembangunan dan kebijakan yang berkembang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kebumen yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen



BAHRUN MUNAWIR, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19860825 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	70
3.2 Strategi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan	76
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
4.1 Uraian Program dan Kegiatan	81
4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	103
4.3 Uraian Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	123
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	127
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	129
BAB V PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025	16
Tabel 2.2 Pegawai Bapperida Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	16
Tabel 2.3 Komposisi SDM Bapperida 2025 Menurut Jabatan	17
Tabel 2.4 Pegawai Bapperida Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	19
Tabel 2.5 Pegawai Bapperida Berdasar Golongan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.6 Aset Tanah Bapperida	21
Tabel 2.7 Gedung dan Bangunan Bapperida.....	22
Tabel 2.8 Sarana Prasarana Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	22
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Tahun 2021 - 2025	28
Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	30
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2025.....	31
Tabel 2.12 Sasaran Layanan Bapperida Kabupaten Kebumen	37
Tabel 2.13 Permasalahan Bapperida Kabupaten Kebumen	42
Tabel 2.14 Implikasi Penetapan RTRW.....	53
Tabel 2.15 Arah Kebijakan dan Rekomendasi Intervensi KLHS Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan Tupoksi Bapperida	55
Tabel 2.16 Peranan Bapperida Dalam Pencapaian Program Unggulan Daerah	65
Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	68
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	73
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida	75

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2029.....	76
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	78
Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Kabupaten Kebumen	82
Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah.....	85
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	90
Tabel 4.4 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	104
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	123
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	128
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kebumen	11
Gambar 2.2 Kerangka Kelembagaan Sektor Publik Bidang Riset dan Inovasi di Indonesia	47
Gambar 2.3 Keterkaitan Tujuan Renstra Bapperida dengan RPD 2024 - 2026.....	48
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	71
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	71
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	81

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian



dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Kebumen berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2045, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Hal ini dilakukan dengan harapan terdapat integrasi, sinrkonisasi dan sinergitas antara potensi sumber daya, peluang dan tantangan khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang penelitian dan pengembangan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akuntabel, efisien dan efektif.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka Bapperida juga dituntut mampu meningkatkan layanan berdasarkan tugas dan fungsi guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Upaya dilakukan secara konsisten dan sistematis dalam mendukung terwujudnya Kebumen Berdaya (Kebumen Sejahtera Maju dan Berbudaya).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- 
- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);

- 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomo3 219);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* urusan perencanaan dan litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bapperida adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran pelayanan Bapperida, permasalahan dan isu strategis Bapperida.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Bapperida yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah melalui IKK.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, ketersediaan



anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja.
2. Casecading.
3. Rencana Program Kegiatan, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan.
4. Indikator Kinerja Kunci.
5. Rumus Perhitungan Indikator.
6. SK Penyusunan Renstra Bapperida
7. Pelaksanaan Forum Renstra Bapperida.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tugas pokok dari Bapperida Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan urusan Perencanaan dan Litbang yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapperida mempunyai fungsi

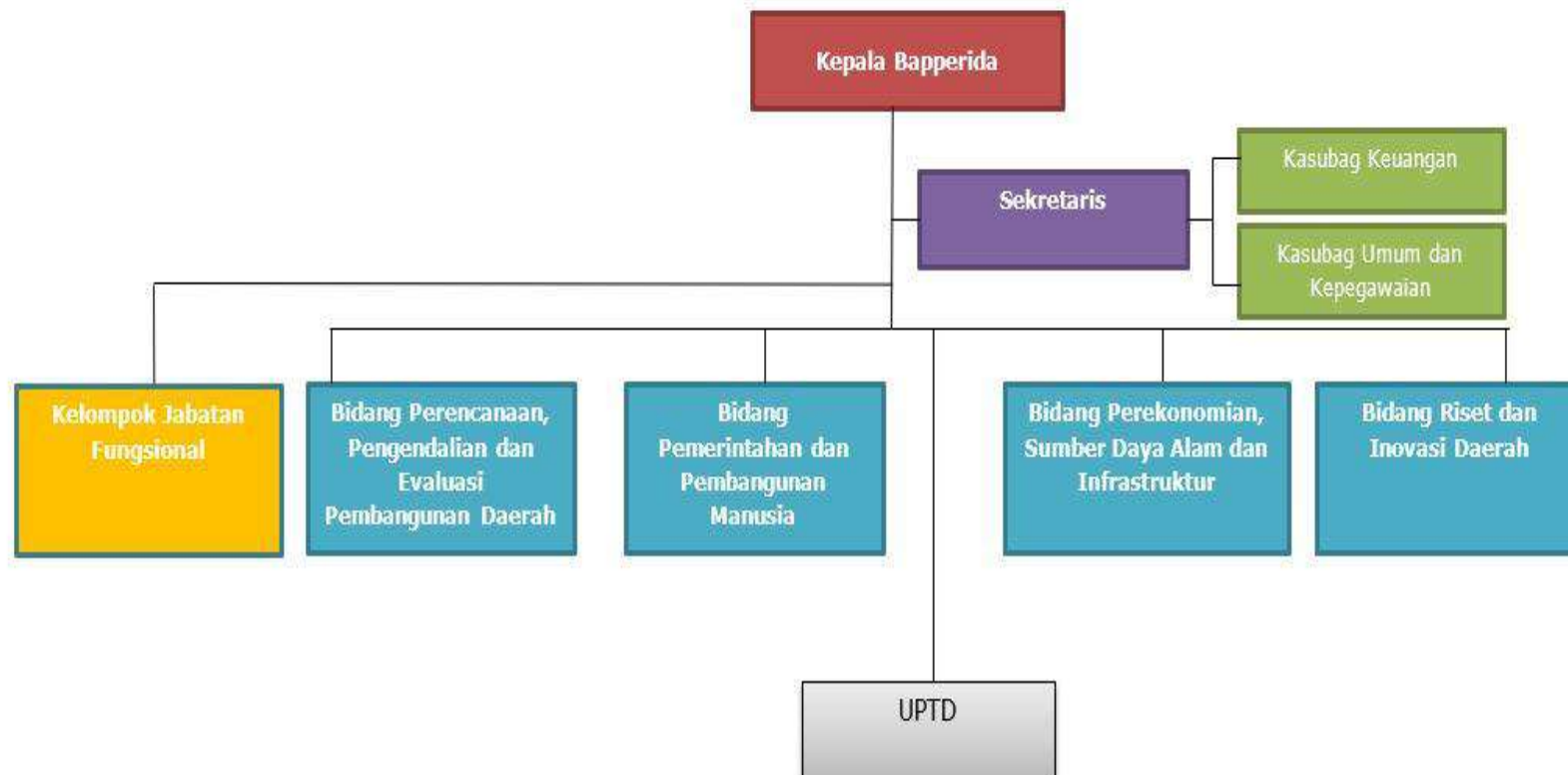
- a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia,

- 
- perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD pada Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bapperida adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kebumen





Susunan organisasi Badan terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.
- b. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi



perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan data informasi pembangunan Daerah.

- b. Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari pelaksanaan, koordinasi, koordinasi dan pengendalian dalam subbidang Perencanaan dan Pendanaan serta Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan unsur Kewilayahan.
- b. Susunan organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas Kelompok



Jabatan Fungsional yang terdiri dari pelaksanaan, koordinasi, koordinasi dan pengendalian dalam subbidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, kebudayaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- b. Susunan organisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur yang terdiri dari pelaksanaan, koordinasi, koordinasi dan pengendalian dalam subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- a. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian,



pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- b. Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian subbidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Invensi dan Inovasi.

7. UPTD

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumber daya manusia pada Bapperida di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Bapperida Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	23	24	20	19	17	25
Perempuan	16	15	11	12	12	27
Jumlah ASN	39	39	31	31	29	52

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 jumlah pegawai Bapperida cenderung mengalami penurunan, namun pada Tahun 2025 dan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengadaan pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2
Pegawai Bapperida Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	8	5	13
3	Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi pembangunan	6	4	10

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Daerah			
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	8
5	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	2	6	8
6	Bidang Riset dan Inovasi	4	8	12
	Jumlah	25	27	52
	Persentase	48%	52%	100%

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, jumlah pegawai Bapperida dengan jenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai laki-laki dengan perbandingan 27 pegawai perempuan dan 25 pegawai laki-laki. Perbandingan yang relatif seimbang ini menunjukkan bahwa Bapperida Kabupaten Kebumen telah menerapkan prinsip kesetaraan gender pada proses penerimaan pegawai.

Tabel 2.3
Komposisi SDM Bapperida 2025 Menurut Jabatan

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Bapperida	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	III.b	1
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	III.b	1
5	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam & Infrastruktur	III.b	1

6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	III.b	1
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1
8	Kasubag Keuangan	IV.a	1
9	Perencana Ahli Madya		1
10	Perencana Ahli Muda		5
11	Perencana Ahli Pertama		16
12	Penelaah Teknis Kebijakan		4
13	Analisis Tata Ruang		1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda		2
15	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		3
16	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama		2
17	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama		2
18	Arsiparis Ahli Pertama		1
19	Pranata Komputer Terampil		2
20	Pengolah Data dan Informasi		1
21	Pengadministrasian Perkantoran		3
22	Operator Layanan Operasional		1
	Jumlah		52

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, jabatan yang paling banyak diisi di Bapperida Kabupaten Kebumen adalah jabatan fungsional Perencana. Hal ini selaras dengan tugas Bapperida Kabupaten Kebumen yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.4
Pegawai Bapperida Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	1	7	1	3		1	13
3	Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	6	2				10
4	Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	7					8
5	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	3	5					8
6	Bidang Riset dan Inovasi	3	9					12
	Jumlah	11	34	3	3	-	1	52
	Persentase %	21,15	65,38	5,77	5,77	-	1,92	100

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, komposisi pegawai Bapperida mayoritas diisi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana/S1 dengan jumlah 34 pegawai (sebesar 65,38%), diikuti oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 11 pegawai (sebesar 21,15%). Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum kualifikasi pegawai Bapperida memadai untuk menjalani tugas dan fungsi Bapperida.

Tabel 2.5
Pegawai Bapperida Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/ II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat	-/1	1/-	10	1	13
3	Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2/1		6	1	10
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1		7		8
5	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	-/1		5	2	8
6	Bidang Riset dan Inovasi	-/2		9	1	12
	Jumlah	2/6	1/-	37	6	52

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.5, mayoritas Pegawai Bapperida Kebumen merupakan Golongan III dengan jumlah 37 Pegawai dari total 52 Pegawai. Hal ini selaras dengan mayoritas latar belakang pendidikan terakhir Pegawai Bapperida Kebumen yaitu Sarjana/S1, serta selaras dengan mayoritas jabatan Pegawai Bapperida Kebumen yaitu fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida yang berasal dari APBD maupun APBN, yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Aset Tanah Bapperida Kabupaten Kebumen

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	34.632	1981	Jl. Veteran	Pakai	1981	5616590	Perkantoran	Hak Pakai dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen	-	Pada tahun 2021 Alamat: Jl Veteran berganti nama menjadi Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.6, Bapperida Kebumen memiliki aset tanah hasil pengadaan Tahun 1981 yang telah diberikan hak pakainya dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen untuk fungsi perkantoran. Namun, terjadi perubahan nama jalan pada alamat dalam kepemilikan aset tanah di tahun 2021 dari Jalan Veteran, berganti menjadi Jalan Merdeka.

Tabel 2.7
Gedung dan Bangunan Bapperida

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B,Kb,Rb)	Luas Lantai M2	Letak / Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1164	Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen	1164	Hak Pakai	Pembelian	731.272.450	Nomor Surat IMB Gedung: SK-IMB-330512-23112020-01 tanggal 23 November 2020

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.7, Bapperida Kebumen memiliki bangunan gedung kantor permanen dengan kondisi baik. Gedung tersebut memiliki hak pakai dari upaya pembelian, dengan kelengkapan Surat IMB Gedung tersedia.

Tabel 2.8.
Sarana Prasarana Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	A.C. Split	26	23	2		1	23	4
2	Alat Pemadam/Portable	5	5				5	1
3	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	1	1					

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
4	Audio Cassette Recorder	1	0	1				
5	Audio Mixing Console	1	1					
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1				1	
7	Bracket Standing Peralatan	1	1					
8	Buku perpustakaan	227	227					
9	Capture Card	1	1					
10	Cermin Besar	3	3					
11	Copy Board/Elektrik White Board	1	1					
12	Facsimile	2	1	1				
13	Filing Cabinet Besi	15	15					
14	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1					
15	Global Positioning System	2	2					
16	Handy Cam	3	3					
17	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	3	2			1	1	
18	Internet	1	1				1	
19	Jam Elektronik	16	16					
20	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	1					
21	Kipas Angin	2	2					
22	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1					

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
23	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13	13				13	31
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1					
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	2	3		3		
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	12	2				
27	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	16	16					
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	168	168				168	35
29	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	10	9	1			9	
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1					
31	Kamera zoom							3
32	Lambang Garuda Pancasila	1	1					
33	Layar Film/Projector	3	3					
34	LCD Projector/Infocus	7	7				7	1
35	Lemari Besi/Metal	11	10	1				2
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	17	11	6				
37	Lemari es	2	2					
38	Lemari Kaca	2	2					
39	Lemari Kayu	2	2					
40	Lensa Kamera	1	1					1
41	Meja 1/2 Biro	5	2			3		

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	51	44	7			44	
43	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	6					
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	12					
45	Meja Komputer	2	1	1				
46	Meja Rapat	25	23			2		3
47	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1					
48	Meja Resepsionis	2	2					
49	Meja Tambahan	2	2					
50	Meja Telepon	2	2					
51	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1					
52	Mesin Pemotong Rumput	1	1				1	
53	Microphone table stand	2	2					
54	Microphone/Wireless MIC	1	1				1	3
55	Monitor	4	1	3			1	5
56	Note Book	47	38	5		4	38	17
57	P.C Unit	11	10	1			10	
58	Perangkat lunak sistem operasi	4	2	2				
59	Penghancur kertas							2
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	30	8		1	30	3



No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
61	Rak Besi	19	18	1				10
62	Rak Kayu	20	20					
63	Router	1	0	1				
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3				3	2
65	Sepeda Motor	28	24	4			24	
66	Server	2	1	1				
67	Sofa	4	4					
68	Sound System	4	3		1		3	1
69	Station Wagon (mobil)	5	4		1		5	1
70	Stationary Generating Set (genset)	1	1				1	
71	Stationary Water Pump (pompa air)	2	1	1				1
72	Tabung Gas	1	1					
73	Tangga Aluminium	1	1					
74	Tele Recorder	2	2					
75	Telephone (PABX)	11	4	7				
76	Televisi	3	3				3	8
77	Tiang Bendera	2	2					
78	Tripod Camera	1	1					
79	Tustel (Kamera Photo)	3	3				3	



No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
80	Video Monitor (CCTV)	3	2	1			2	1
81	White Board	8	7	1				
	Jumlah	934	856	61	2	15	397	135

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada sebagaimana tabel di atas, untuk menunjang pelaksanaan tugas Bapperida di samping perlu dilakukan pemeliharaan sarana prasarana yang dimiliki, juga masih membutuhkan beberapa kelengkapan, antara lain:

- Kebutuhan pemenuhan teknologi informasi 4.0 berupa software dan hardware (notebook, drone, PC).
- Pemenuhan standar pelayanan berupa perkakas kerja (kursi tunggu, papan informasi digital, thermometer infrared).
- Pemenuhan tata laksana perkantoran (mesin penghancur kertas, pemeliharaan gedung, gudang arsip).
- Kebutuhan lain sebagai penunjang kinerja pelayanan Bapperida yaitu berupa mesin penghancur kertas, kursi tunggu panjang, drone, termometer infared dan fingerprint.

Berdasarkan Tabel 2.8, kondisi beberapa barang di Bapperida Kebumen mengalami rusak berat. Namun, telah diadakannya penambahan barang guna mendukung kinerja layanan Bapperida Kabupaten Kebumen dalam kaitannya pengadaan Barang Milik Daerah. Beberapa barang yang dilakukan penambahan antara lain AC Split sebanyak 1 unit, instalasi pusat pengatur listrik kapasitas sedang sebanyak 1 unit, kursi kerja Pejabat Eselon III

sebanyak 3 kursi, meja ½ Biro sebanyak 3 meja, meja rapat sebanyak 2 meja, notebook sebanyak 4 unit, serta printer sebanyak 1 unit.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Bapperida berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan perencanaan dan litbang yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida 2021 -2025

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentasi Capaian						Keterangan
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	Nilai SAKIP	-	-	-	Nilai	64	67	69	71	74	77	65,18	65,49	66,11	67,54	74,70*	-	101,84	97,75	95,81	95,13	100,95	-	
	Indikator Sasaran (Urusan Perencanaan)																							
a.	Indeks Kualitas perencanaan	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	
	Indikator Sasaran (Urusan Penelitian dan Pengembangan)																							

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentasi Capaian						Keterangan
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)			(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	-	-	-	Persen	72,73	75	75	83,33	83,33	91,67	72,73	77,08	75	85,71	74,24*	-	100,00	102,77	100,00	102,86	89,09	-	

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.9, capaian kinerja Nilai SAKIP Bapperida Kebumen Tahun 2021 – 2025 mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Selain itu, Persentase capaian Nilai SAKIP di Tahun 2025 melebihi target, yaitu 100,95%. Hal ini menandakan kinerja Bapperida Kebumen atas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah Bapperida berjalan baik dan berhasil meningkatkan upaya transparansi dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah. Pada Indeks Kualitas Perencanaan Bapperida Kebumen berhasil mempertahankan di 100% capaian kinerja dari tahun 2021 – 2026, yang menandakan konsistensi kinerja dalam menjaga keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah cakupan Kabupaten Kebumen. Pada Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah, cenderung mengalami kenaikan dari 2021 – 2026 menjadi 74,24, walau sempat adanya penurunan di Tahun 2023 dan Tahun 2025. Hal ini menandakan masih perlunya peningkatan implementasi hasil penelitian dan pengembangan serta pengkajian dan penerapan di Kabupaten Kebumen yang dibina oleh Bapperida Kebumen.

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke-					Persentase Capaian Tahun ke-					Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	Belum Tercapai
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	99,22 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	110,24 %	111,11 %	111,11 %	111,11 %	Tercapai
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Tercapai
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	75,00 %	75,00 %	75,00 %	88,33 %	83,30 %	72,73 %	77,08 %	75,00 %	85,71 %	74,24 %	96,97 %	102,77 %	100,00 %	97,03 %	89,12 %	Belum Tercapai

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.10, Kinerja pelayanan Bapperida Kebumen tahun 2020-2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator program mencapai target yang ditetapkan, seperti pada program perencanaan dan koordinasi yang konsisten memperoleh capaian 100%. Meskipun terdapat penurunan pada Tahun 2025 dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan fluktuasi pada indikator pemanfaatan hasil penelitian, secara keseluruhan pada awal periode target tetap tercapai, namun pada akhir periode capaian masih di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Bapperida. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bapperida. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Bapperida.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.649.265.000	6.532.315.000	5.345.676.000	5.428.768.000	6.132.984.000	5390877637	5.831.582.196	5.245.635.348	5.132.444.366	4.182.411.137	95,42	95,10 %	98,13	94,54 %	68,20	3,00	-5,64
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	66.247.000	50.039.000	41.718.000	44.118.000	57.180.000	66.078.800	49.845.100	41.404.550	44.067.500	34.589.000	99,75	99,61 %	99,25	99,89 %	60,49	-1,43	-14,14

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.855.796.000	5.477.111.000	4.440.776.000	4.336.333.000	4.864.054.000	4.657.962.262	4.882.088.720	4.355.590.789	4.068.258.841	3.357.446.802	95,93	96,15%	98,08	93,82%	69,03	0,92	-7,51
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		102.850.000	50.000.000	10.000.000	7.856.000		86.484.035	49.856.600	9.888.130			84,08%	99,71	98,88%		-38,21	-55,63
	Administrasi umum perangkat daerah	346.911.000	339.699.000	420.140.000	520.649.000	393.863.000	337.389.256	320.365.578	419.615.727	514.303.868	297.237.942	97,26	94,30%	99,88	98,78%	75,47	5,29	1,57
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.500.000	206.000.000	80.950.000	80.000.000	383.672.000	44.269.000	157.513.000	75.316.000	71.845.000	188.718.000	93,20	76,46%	93,04	89,81%	28,89	162,85	90,42
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	139.587.000	156.616.000	151.592.000	199.668.000	204.105.000	113.756.415	145.089.895	144.575.695	191.465.951	136.854.889	81,49	92,64%	95,37	95,89%	67,05	10,73	7,78

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	193.224.000	200.000.000	160.500.000	238.000.000	222.254.000	170.956.208	190.195.868	159.275.987	232.615.076	167.564.504	88,48	95,09%	99,24	97,74	75,39	6,36	3,27
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.562.366.000	703.100.000	1.196.614.000	1.248.079.000	1.101.951.000	1.216.320.445	692.728.552	1.179.022.595	1.244.077.503	984.411.620	77,85	98,52%	98,53	99,68%	89,33	1,95	2,95
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	1.110.308.000	602.600.000	738.837.000	1.033.869.000	940.871.000	1.094.570.950	598.505.658	731.009.249	1.030.918.992	873.217.797	98,58	99,32%	98,94	99,71	92,81	1,95	0,64
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	122,058,000					121.749.495					99,75					0,00	-25,00

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		46.900.000	157.596.000	121.407.000	84.986.000		43.459.000	155.004.753	120.878.371	61.851.346		92,66 %	98,36	99,56 %	72,78	45,77	46,46
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		53.600.000	300.181.000	92.803.000	76.094.000		50.763.894	293.008.593	92.280.140	49.342.477		94,71 %	97,61	99,44 %	64,84	93,24	90,54
3.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.054.526.000	700.916.000	636.688.000	749.671.000	638.624.000	1.048.124.976	691.624.379	619.683.455	748.336.917	516.752.709	99.39	98,67 %	97,33	99,82 %	80,92	-9,94	-13,65
	Koordinasi Perencanaan	251.963.000	185.112.000	255.142.000	249.228.000	166.321.000	251.623.471	182.563.957	248.506.078	248.407.536	126.404.262	99.87	98,62 %	97,4	99,67 %	76,00	-6,07	-10,12

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	196.374.000	139.304.000	250.758.000	231.919.000	276.934.000	196.111.745	137.663.409	249.168.384	231.706.911	222.857.209	99,87	98,82%	99,37	99,91%	80,47	15,71	10,09
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	606.189.000	376.500.000	130.788.000	268.524.000	195.369.000	600.389.760	371.397.013	122.008.993	268.222.470	167.491.238	99,04	98,64%	93,29	99,89%	85,73	-6,27	-5,75
4.	Program penelitian dan pengembangan daerah	670.922.000	462.007.000	482.039.000	821.085.000	1.114.269.000	667.410.100	457.022.350	475.689.611	819.392.233	775.502.067	99,48	98,92%	98,68	99,79%	69,60	19,81	9,86
	Pengembangan inovasi	670.922.000	89.679.000	166.580.000	217.938.000	381.899.000	667.410.100	88.689.930	163.821.572	217.481.031	243.670.248	99,48	98,90%	98,34	99,79%	63,80	26,30	10,70



No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja %					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Anggaran Perubahan	Realisasi
	dan teknologi																	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		372.328.000	315.459.000	603.147.000	732.370.000		368.332.420	311.868.039	601.911.202	531.831.819		98,93 %	98,86	99,80 %	72,62	24,34	16,51

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.11, Kinerja program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara umum menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang sangat tinggi setiap tahunnya, dengan capaian rata-rata di atas 95%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Perencanaan, Pengendalian, serta Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tingkat efektivitas yang stabil, meskipun terdapat fluktuasi pada rata-rata pertumbuhan, terutama pada tahun 2024-2025 yang cenderung menurun. Sementara itu, program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan Daerah juga menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dengan tingkat realisasi mendekati 100%, menandakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang efisien. Namun, beberapa subprogram seperti pengadaan barang milik daerah dan kegiatan inovasi teknologi masih menunjukkan variasi pertumbuhan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, tabel

tersebut menggambarkan pengelolaan anggaran yang konsisten dan capaian kerja yang optimal di Sebagian besar program, dengan ruang perbaikan pada aspek efisiensi pertumbuhan dan pengendalian kegiatan tertentu.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan Sasaran Layanan dari seluruh Bidang pada Bapperida Kabupaten Kebumen beserta kelompok sasaran layanan.

Tabel 2.12
Sasaran Layanan Bapperida Kabupaten Kebumen

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Sekretariat	• Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi umum • Pengelolaan Barang Milik Daerah • Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi kepegawaian • Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan • Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah	• Pimpinan dan Pegawai Bapperida • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	• Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) • Fasilitasi dan asistensi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah • Penyusunan rancangan awal RKPD dan dokumen perencanaan tahunan • Pengendalian pelaksanaan	• Perangkat Daerah • Kecamatan • Masyarakat • Instansi Vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		pembangunan daerah • Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (meliputi capaian kinerja dan realisasi anggaran) • Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten • Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (misalnya SIPD-RI) • Fasilitasi integrasi perencanaan pusat dan daerah	
4.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	• Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan • Asistensi penyusunan dokumen perencanaan • Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang PSDAI • Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah • Fasilitasi pertemuan lainnya berkaitan dengan bidang PSDAI • Fasilitasi kegiatan Geopark Kebumen	• PD Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Disperindag KUKM, Disnaker, Disparbud, Distapang, DLHKP, DPMPTSP) • PD Koordinasi Bidang Infrastruktur (Diskominfo, DPUPR, Disperkimhub) • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	• Pelaksanaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) • Koordinasi Stunting • Koordinasi KLA, PUG, KKS, TBC, ATS • Penyusunan Laporan SDGs • Penyusunan Laporan Kerjasama KKN	• PD Koordinasi Bidang Pemerintahan (Bapperida, Setda, Setwan, Inspektorat, BPKPD, BKPSDM, Disdukcapil) • PD Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia (Disdikpora, Dinkes PPKB, Dinsos P3A, Disarpus)



No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		• Koordinasi dan Fasilitasi Kecamatan • Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan • Asistensi penyusunan dokumen perencanaan • Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang PSDAI • Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah • Fasilitasi pertemuan lainnya berkaitan dengan bidang PSDAI	• PD Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PMD, Bakesbangpol, BPBD, Satpol PP, serta Seluruh Kecamatan) • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
6.	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	• Fasilitasi kegiatan riset dan inovasi daerah • Fasilitasi Kegiatan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) • Fasilitasi Lomba Artikel Ilmiah	• PD Koordinasi bidang riset dan inovasi daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait

Sumber: Bapperida Kebumen, 2025.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelayanan perangkat daerah adalah segala bentuk hambatan, kendala, atau ketidaksesuaian yang menyebabkan pelayanan publik tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan, dan tidak memenuhi ekspektasi maupun ketentuan standar pelayanan.

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Bapperida sebagai berikut:

1. Optimalisasi penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem teknologi informasi serta kreativitas dan inovasi.
2. Implementasi sinkronisasi pelaksanaan program prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Terbatasnya kemampuan fiskal untuk mendukung program prioritas daerah.
4. Adaptif terhadap dinamika implementasi Sistem Informasi Kemendagri terhadap Perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyusunan kebijakan yang menekankan pada proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset dan inovasi.
6. Peningkatan komitmen dalam peningkatan iklim riset dan inovasi

Sedangkan peluang bagi Bapperida untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- 
1. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam perencanaan pembangunan pengembangan riset dan inovasi daerah
 2. Peningkatan pemanfaatan Satu Data Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan riset dan inovasi daerah
 3. Peningkatan iklim riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah
 4. Peningkatan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan Perangkat Daerah, Bapperida mempunyai beberapa permasalahan yaitu :

- 1- Belum optimalnya kualitas Perencanaan daerah
- 2- Belum optimalnya kapabilitas inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah.
- 3- Masih rendahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) dan IKM Perangkat Daerah (Bapperida)

Selanjutnya permasalahan-permasalahan telah dipetakan dalam 3 level sebagai berikut :

Tabel 2.13
Permasalahan Bapperida Kabupaten Kebumen

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas Perencanaan daerah	Belum optimalnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja	• Belum optimalnya kapasitas SDM di bidang perencanaan • Belum optimalnya tindak lanjut atas evaluasi dan review dokumen perencanaan • Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas nasional	• Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional
		Belum optimalnya transformasi digital dalam perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pemuktahiran satu data.	• Belum adaptif terhadap dinamika implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan
			• Belum optimalnya pemanfaatan satu data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2	Belum optimalnya kapabilitas inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah.	Belum optimalnya iklim riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah	• Masih kurangnya penyusunan kebijakan yang menekankan proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset dan inovasi • Masih lemahnya komitmen dan kesepahaman pelaku riset dan inovasi dengan pihak pengguna • Masih kurangnya sinergitas perencanaan riset dan inovasi melalui keterlibatan stakeholder terkait.
		Masih kurangnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah	• Belum optimalnya proses riset dan inovasi yang aplikatif dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat • Belum optimalnya kapasitas SDM dalam bidang riset dan inovasi (ADI /Analisis Data Ilmiah, API /Analisis Pemanfaatan Iptek dan Peneliti) • Masih kurangnya sarana dan prasarana riset dan inovasi daerah.



No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	- Masih kurangnya pelaksanaan regulasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk perencanaan pembangunan - Masih kurangnya hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk pemangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
3	Masih rendahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) dan IKM Perangkat Daerah (Bapperida)	Belum Optimalnya pelayanan tugas fungsi PD dan akuntabilitas kinerja	- Belum standartnya pemenuhan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah - Belum optimalnya kualitas dokumen peencanaan kinerja perangkat daerah dalam menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. - Belum optimalnya pelaporan kinerja layanan tugas dan fungsi PD - Belum optimalnya tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal PD - Belum terpenuhinya SOP yang mendukung kinerja Perangkat Daerah - Belum optimalnya pemanfatan IT dalam melaksanakan layanan tugas dan fungsi PD - Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung layanan tugas dan fungsi - Belum optimalnya kinerja SDM

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

b. Telaah

1) Telaah Kementerian PPN/Bappenas dan BRIN

Renstra Bapperida juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan BRIN. Mendasari RPJMN 2025-2029 dan Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 adalah: “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Misi adalah :

- Misi -1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
- Misi -2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan, sebagai berikut :

- Misi -1 :
Tujuan -1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan -2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Misi -2 :
Tujuan -3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sedangkan sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan -1 :

- Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan -2 :

- Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan -3 :

- Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sementara itu Visi BRIN 2020 - 2024 adalah: Terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden : Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagaproduktifan, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta



melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Dalam upaya penguatan kelembagaan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia terdapat 5 (lima) aktor yang memiliki peran yaitu :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan sebagai perumus kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan koordinator pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. BRIN berperan sebagai pelaksana dan penghasil produk riset strategis (inovasi dan inovasi), pencipta ekosistem inovasi strategis, dan perumus kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi, peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan;
3. Kementerian/lembaga berperan sebagai pemanfaat produk riset strategis (inovasi dan inovasi) dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti

(*evidence based policy*). Dengan adanya Forum Komunikasi Riset dan Inovasi BRIN, diharapkan menjadi ajang komunikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan kebijakan riset dan inovasi dari setiap kementerian/lembaga, industri, dan daerah;

4. Badan Riset dan Inovasi Daerah berperan sebagai pemanfaat produk riset strategis (inovasi dan inovasi) di daerah; dan
5. Perguruan tinggi berperan sebagai universitas yang berfokus pada riset (*research university*), universitas yang berfokus pada kualitas pembelajaran (*teaching university*), universitas dengan program diploma kejuruan (*vocational university*) dan sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup menguatkan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat.



Gambar 2.2
Kerangka Kelembagaan sektor Publik Bidang Riset dan Inovasi di Indonesia

2) Telaah Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BRIDA Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Sebagai institusi

pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah Mendukung pada sasaran ke-4 dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mencerminkan lingkungan yang kolaboratif dan sinergis antar pihak yang terkait di dalamnya.



Gambar 2.3
Keterkaitan Tujuan Renstra Bappeda dengan RPD 2024-2026

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Jawa Tengah selama Tahun 2024 – 2026 adalah **“Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi



Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan;
2. Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 diperlukan adanya riset dan inovasi yang terintegrasi sehingga potensi-potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Hasil riset dan inovasi yang terintegrasi diharapkan dapat diterapkan untuk kehidupan masyarakat dan kepentingan publik, untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dengan pembangunan maka dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya riset yang optimal dan terukur. Badan Riset dan Inovasi Daerah



Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga sasaran tahun 2024-2026 yaitu:

1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan riset dan inovasi;
2. Mendorong optimalisasi, forum jejaring kemitraan lintas stakeholders di berbagai tingkat (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota);
3. Meningkatkan sinergi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas.

Sedangkan Isu strategis BRIDA Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Perencanaan terhadap kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berdasarkan hasil riset.
2. Masih kurangnya kuantitas fungsional periset di Jawa Tengah.
3. Masih kurangnya proses kolaboratif pemanfaatan dan pengembangan inovasi dan kebijakan implementasi inovasi.

3) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bapperida. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bapperida dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bapperida dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi



program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Bapperida dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2024-2044 (Perda Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024). Penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agribisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- (i) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung agrobisnis dan pariwisata.
- (ii) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi: pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya meliputi: (a) pengembangan ekonomi Wilayah

- 
- berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan; dan
- c. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (iii) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Strategi penataan ruang wilayah dalam *pengembangan pusat pertumbuhan wilayah* di Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- b. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung agrobisnis dan pariwisata.
- c. Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.
- d. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing.
- e. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Arahan penataan ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2024-2044, terbagi menjadi arahan

pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Adapun implikasi penetapan RTRW yang berkaitan dengan tupoksi Bapperida antara lain adalah:

Tabel 2.14
Implikasi Penetapan RTRW

No.	Keterlibatan Bapperida
1.	URUSAN LINGKUNGAN
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
2.	URUSAN ENERGI SDM
	Kajian Pembangunan Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari kilang pengolahan – konsumen
	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif
	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM
	Kajian Pembangunan Embung Baru
	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten
	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Secara Berkala
4.	URUSAN GEOPARK
	Pengembangan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil
	Kajian Deliniasi Situs Geologi
	Kajian Pengembangan Geopark.
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Geopark
5.	URUSAN KEBUDAYAAN
	Pengendalian Kegiatan Budi Daya Terbangun Pada Kawasan Cagar Budaya: ▪ Benteng Van Der Wijck ▪ DKT Gombong ▪ SMP N 1 Prembun
6.	URUSAN PERTANIAN
	Penetapan dan Perlindungan KP2B
	Pengkajian Alih Fungsi Lahan Pertanian
	Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan
7.	URUSAN INDUSTRI
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang Ramah Lingkungan
8.	URUSAN PARIWISATA
	Pengembangan Pariwisata Budaya

No.	Keterlibatan Bapperida
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Ekonomi Kreatif
9.	URUSAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)
10.	URUSAN TATA RUANG
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
	Penataan Kawasan Kota Pusaka Gombang

4) Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 tujuan dengan capaian yang terukur dan terarah dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan pada tahun 2030. TPB memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Dalam rangka keberhasilan pembangunan, TPB menempatkan kondisi lingkungan (biosfer) sebagai dasar dalam menopang kesejahteraan sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi

lingkungan dengan daya dukung kehidupan yang baik, akan mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera, untuk selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. TPB memiliki peranan sebagai salah satu instrumen dalam merumuskan isu strategis untuk penyempurnaan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Dalam KLHS untuk RPJMD, analisis capaian indikator TPB dilakukan dengan membandingkan target dan indikator TPB dengan TPB sesuai dengan Perpres 111 Tahun 2022.

Dalam melaksanakan tupoksinya Bapperida juga memiliki peran dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dokumen KLHS RPJMD memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Bapperida dalam beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 2.15
Arah Kebijakan dan Rekomendasi Intervensi KLHS
Kabupaten Kebumen yang Berkaitan dengan Tupoksi
Bapperida

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	REKOMENDASI INTERVENSI
1.	Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan dan peningkatan distribusi kesejahteraan	Peningkatan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin
2.	Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan Ekonomi melalui Sektor Industri Berbasis Riset	• Peningkatan anggaran riset untuk pembangunan ekonomi yang selaras dengan perkembangan IPTEK • Perkuatan badan riset daerah dengan dukungan tenaga yang profesional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah • Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	REKOMENDASI INTERVENSI
			pengembangan riset

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam Renstra 2025-2029 adalah:

1. TPB di Kebumen telah terpetakan sejak tahun 2010 sehingga dukungan Perangkat Daerah sangat besar dalam mewujudkan TPB.
2. Dokumen RTRW tahun 2024 telah tersusun yang akan diikuti dengan dokumen RDTR yang lebih operasional.
3. Telah disusun berbagai dokumen pendukung Pengembangan Geopark Kebumen.

Faktor penghambat keterlaksanannya RTRW/KLHS dalam Renstra Bapperida adalah:

1. Pertumbuhan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Alih lahan pertanian ke lahan perumahan dan industri.
3. Kegiatan penambangan liar galian C.
4. Masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen periode 2021-2025.

5) Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Misi menjadi

fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Visi Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka Visi Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

**KEBUMEN BERDAYA :
KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA -
BERBUDAYA**

KEBUMEN

Kebumen menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Kebumen merupakan suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah) yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebumen menunjukkan identitas wilayah dan masyarakat Kebumen yang bangga dengan daerahnya sendiri yang memiliki keragaman potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya serta ekosistemnya.

BERIMAN

Beriman mengandung arti bahwa mempunyai iman (ketetapan hati) mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman juga mengambil makna dan semangat dari sila pertama Pancasila yaitu pengakuan dari seluruh Bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Beriman menggambarkan masyarakat kebumen yang mempunyai keimanan kepada Tuhan YME, religius dan mengedapankan nilai-nilai keimanan dalam pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Makna yang lain adalah semangat untuk membangkitkan slogan kebumen beriman "Bersih, Indah, Manfaat, Aman dan Nyaman".

MAJU

Terbangunnya sistem dan tata Kelola pemerintahan Daerah – Desa yang baik, bersih, melayani, dan ngayomi (melindungi) dengan dukungan ASN yang berkualitas, berahalaq dan mumpuni serta mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan Perdesaan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan serta memperkuat sistem digitalisasi

SEJAHTERA

Kebumen Sejahtera adalah Kebumen sebagai kabupaten dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya telah terpenuhi secara berimbang yang didukung oleh stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejahtera merupakan suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik



kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya.

BERBUDAYA

Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, dan partisipasi untuk dijadikan dasar terlibat langsung dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju Kebumen yang Beriman/Relegius sehingga terwujud masyarakat Kebumen yang lebih aman, nyaman, tertib, dan tentram, sehingga memiliki kemadirian, keberdayaan, dan jati diri atas dasar nilai sosial dan budaya lokal yang ditandai berkembangnya seni dan budaya.

Kebumen berdaya dapat menjadikan rakyatnya lebih sejahtera meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, mengatasi ketimpangan dan pengangguran, terpenuhinya hak dasar meliputi pendidikan, kesehatan, sanitasi, pangan, perumahan, dan informasi serta pemerataan pembangunan Desa/Kawasan Perdesaan merupakan amanah yang harus diwujudkan. Kebumen Berdaya adalah Kebumen yang berkeadilan gender, disabilitas dan inklusif serta mengedepankan merit sistem dalam pelayanan publik. Artinya bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus mampu menjadi tauladan dan mengutamakan ahlakul karimah dan tidak intimidatif serta diskriminatif dalam memberikan akses informasi dan pelayanan publik, dan hidup dalam kerukunan antar umat beragama serta memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kebumen



Beriman. Kebumen Berdaya ditandai pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan dan sosial, dimana setiap warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana alam dan non alam. Masyarakat Kebumen senantiasa memiliki kepedulian untuk menjaga hutan, air, sungai, gunung, laut, dan keragaman hayati agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan masa depan. Sebagai bentuk aktualisasi atas keberdayaan masyarakat Kebumen dibutuhkan upaya perbaikan yang cepat dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, keswadayaan, dan kegotongroyongan, maka rumusan kaidah pelaksanaan visi adalah gerakan bersama membangun Kebumen kembali Beriman menuju Kebumen Berdaya melalui semboyan "GERBANG KEBUMEN BERDAYA" kepanjangan dari Gerakan Bersama Membangun Kebumen Beriman - Maju - Sejahtera, dan Berbudaya.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi beberapa Misi yang antara lain adalah:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkeadilan serta pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan.
2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat.



Program Unggulannya yang telah dicanangkan di Kabupaten Kebumen antara lain adalah:

1. Mangan Wareg dan Bergizi Bareng Biyunge

Program Ketahanan pangan dan pemberian gizi masyarakat yang difokuskan untuk membangun ketahanan pangan di Kebumen sebagai salah satu lumbung padi Jawa Tengah, mempercepat penanggulangan gizi buruk, gizi kurang dan stunting melalui pemenuhan makan bergizi anak, gizi keluarga terutama lansia dan pemberian makanan siang gratis.

2. Sregep Ngode Bareng Biyunge

Program perluasan lapangan kerja melalui upaya mendekatkan investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memberikan akses tenaga tenaga kerja difabel, perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya, serta perlindungan dan fasilitasi pekerja migran.

3. Biyunge Momong

Merupakan program pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas, pencegahan dan pelayanan perlindungan korban KDRT, dan perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran.

4. Bakulan Laris

Program pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil yang diarahkan untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil dengan mengoptimalkan sinergi program pengembangan pariwisata dan Geopark, bantuan permodalan untuk pedagang pasar dan pelaku usaha kecil lainnya.

5. Petani Makmur

Program pemberdayaan petani dan optimalisasi nilai produk pertanian yang diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, pemberdayaan petani, peningkatan nilai produk pertanian, peningkatan alokasi anggaran untuk urusan pertanian dan program pengembangan agrobisnis terpadu diwilayah.

6. Esuk Nandur Sore Panen

Program pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: pengadaan bibit, pendampingan, pemasaran dan memfasilitasi kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak terkait.

7. Plesir Bareng Biyunge

Program optimalisasi potensi wisata dan peningkatan kunjungan wisata yang diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang lebih memiliki daya jual dan menarik wisatawan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pembangunan kawasan wisata. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui optimalisasi tata kelola wisata milik daerah dan meningkatkan peran kaum muda dan ekonomi kreatif dalam melakukan pemasaran dan pengelolaan pariwisata.

8. Njamu Bergas

Program peningkatan dan pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan irigasi yang memiliki

akronim: Gawe Jalan, Jembatan Mulus, Air Bersih dan Irigasi.

9. Lingkungan Bersih Lestari

Program pelestarian lingkungan hidup, Pengurangan Kawasan kumuh dan ketahanan bencana yang akan dilakukan melalui: pemberdayaan masyarakat dalam gerakan sadar menanam, Desa Tangguh Bencana, program stimulan ADD dan/atau BHPR berbasis ekologi, serta memperkuat kerjasama sinergis dengan program pengembangan kawasan geopark, dalam hal pemberdayaan, edukasi, dan konservasi.

10. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan serta penempatan ASN sesuai dengan keahlian dan mendekatkan ASN dari tempat tinggal ke tempat kerja.

11. Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge

Program memperkuat akses keterbukaan informasi, dan partisipasi publik melalui talkshow, pertemuan secara langsung, media sosial, media pengaduan, temu kangen langsung dengan masyarakat, dan forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan aktif generasi milenial serta optimalisasi penerapan digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah (PAD).

12. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat



kemandirian Desa. Agendan kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, penguatan tata kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Anak Soleh

Merupakan program untuk memfasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan guna mencetak anak yang soleh/berbudi luhur, melalui sosialisasi ayo mondok, fasilitasi legalitas hukum kelembagaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas, bea siswa, insentif ustadz/ guru, dan/atau bantuan keuangan lainnya.

14. Ayem Tentrem Guyub Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadayaan, gotong royong dan guyub rukun masyarakat dengan menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

15. Muda Kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta kaum muda dalam pembangunan, fasilitasi potensi kaum muda, menyediakan sarana prasarana dan ruang untuk anak muda dalam menyalurkan minat dan bakatnya baik di bidang digital, olahraga, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan perannya, Bapperida mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengembangan riset dan inovasi daerah, Bapperida mendorong terciptanya birokrasi yang efisien, pelayanan publik yang responsif, dan kebijakan yang tepat sasaran sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Bapperida secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Kapabilitas Inovasi Daerah. Peranan Bapperida dalam mendukung Program Unggulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Peranan Bapperida Dalam Pencapaian Program
Unggulan Daerah

No.	Program Unggulan	Uraian Program	Peranan Bapperida
1.	Biyunge Momong	Merupakan program pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas, pencegahan dan pelayanan perlindungan korban KDRT, dan perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran.	Sebagai Koordinator/sekretaris Tim Percepatan Penanggulangan kemiskinan Daerah
			Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
			Menyusun dan menyiapkan draft Peraturan Bupati tentang Kriteria Data Kemiskinan Daerah
			Menyusun dan menyiapkan draft Keputusan Bupati Kebumen terkait Data Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah
			Bekerjasama dengan Instansi terkait menyusun Kajian Snap Shot Kemiskinan Daerah
2.	Ngobrol dan Rembug	Program memperkuat akses keterbukaan informasi, dan partisipasi publik melalui	Melaksanakan Musrenbang Tematik dengan

	Bareng Biyunge	<i>talkshow</i> , pertemuan secara langsung, media sosial, media pengaduan, temu kangen langsung dengan masyarakat, dan forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan aktif generasi milenial serta optimalisasi penerapan digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah (PAD).	menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen
3.	Muda Kreatif	Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta kaum muda dalam pembangunan, fasilitasi potensi kaum muda, menyediakan sarana prasarana dan ruang untuk anak muda dalam menyalurkan minat dan bakatnya baik di bidang digital, olahraga, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.	Melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi daerah yang melibatkan partisipasi kaum muda Melaksanakan lomba penulisan artikel yang melibatkan partisipasi Kaum Muda

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS, BRIN, Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Bapperida sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial
2. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas nasional

- 
3. Masih perlunya Optimalisasi pemanfaatan satu data dalam perencanaan pembangunan daerah
 4. Masih perlunya peningkatan iklim riset dan inovasi dalam dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
 5. Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
 6. Masih perlunya Optimalisasi implementasi hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.
 7. Masih perlunya meningkatkan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida.

Tabel 2.17
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bapperida mempunyai kedudukan strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan seluruh PD yang menjadi unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan di bidang riset dan inovasi daerah.	1. Belum optimalnya kualitas Perencanaan daerah 2. Belum optimalnya kapabilitas inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah 3. Masih rendahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) dan IKM Perangkat Daerah (Bapperida)	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis sistem informasi	1. Perkembangan Teknologi Industri 5.0 2. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi 2. Pemenuhan target-target pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan pemanfaatan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah 3. Kolaborasi pemanfaatan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah 4. Perencanaan terhadap kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berdasarkan hasil riset 5. Masih kurangnya kuantitas	1. Masih perlunya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial 2. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas nasional 3. Masih perlunya Optimalisasi pemanfaatan satu data dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Masih perlunya peningkatan iklim riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Memiliki ketersediaan SDM dan sarana prasarana					fungsiional periset di Jawa Tengah 6. Masih kurangnya proses kolaboratif pemanfaatan dan pengembangan inovasi dan kebijakan implementasi inovasi.	5. Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah 6. Masih perlunya Optimalisasi implementasi hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah 7. Masih perlunya peningkatan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida.

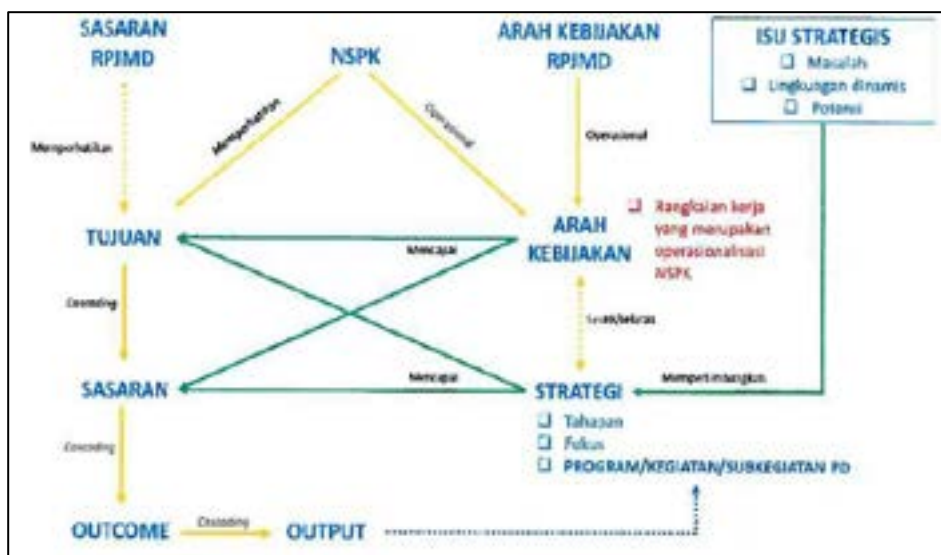
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

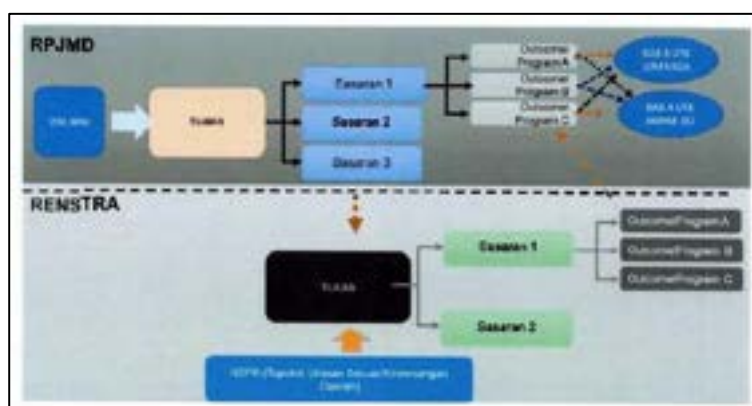
Dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu-isu strategis yang ada. Adapun gambaran hubungan tujuan, sasaran, outcome RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari penetapan visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi arah pembangunan jangka menengah daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan RPJMD, yang selanjutnya diturunkan menjadi beberapa sasaran RPJMD. Setiap sasaran RPJMD memiliki ukuran kinerja yang ditunjukkan melalui outcome atau program pembangunan.



Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN-MAJU-SEJAHTERA -BERBUDAYA”, Bapperida Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) berkontribusi pada Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 yakni **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi**, dengan hubungan tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Renstra Perangkat Daerah		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi Ke -4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi						
	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	<i>Nilai SAKIP</i>			



RPJMD				Renstra Perangkat Daerah		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah		<i>Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah</i>
						<i>Kapabilitas Inovasi</i>
					Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah</i>
					Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	<i>Indeks Inovasi Daerah</i>

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029

Selanjutnya, tujuan RPJMD dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Pada dokumen Renstra Perangkat Daerah, tujuan pembangunan daerah diturunkan kembali menjadi tujuan perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam bentuk sasaran perangkat daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan kontribusi Bapperida pada visi, misi, tujuan, sasaran, atau outcome pada Kabupaten Kebumen dirumuskan tujuan dan sasaran kinerja Bapperida Kabupaten Kebumen dengan rumusan sebagai berikut:



Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Bapperida

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah		Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah	23,10	23,43	23,73	24,31	24,41	24,71	
			Kapabilitas Inovasi	2,97	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	
		Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	23,20	23,50	23,80	24,40	24,50	24,80	
		Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

Sumber : Renstra Bapperida Kebumen Tahun 2025

3.2 Strategi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan

Strategi Perangkat Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan dalam lingkungan yang dinamis.

Untuk mendukung Strategi RPJMD Kabupaten Kabupaten Tahun 2025- 2029 dan pelaksanaan pelayanan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah dijabarkan strategi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Peningkatan kualitas satu data dalam perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pemanfaatan satu data dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial	Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi	



TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
perencanaan urusan pembangunan daerah	perencanaan urusan pembangunan daerah	perencanaan urusan pembangunan daerah	perencanaan urusan pembangunan daerah	
Peningkatan pemenuhan kapasitas SDM dalam bidang riset dan inovasi serta pemenuhan sarana dan prasarana riset dan inovasi daerah	Optimalisasi kolaborasi antar stakeholder dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah	Meningkatkan fasilitasi riset dan inovasi daerah	Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Meningkatnya kapabilitas inovasi daerah
Penguatan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida	Pemenuhan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida	Akselerasi layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida	Pemantapan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida	Meningkatnya layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, selain strategi juga diperlukan arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kapabilitas inovasi daerah	Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi Penerapan e-government untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik	• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial a. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang perencanaan b. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan review dokumen perencanaan c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan • Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas nasional a. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional. • Peningkatan Transformasi digital dalam perencanaan pembangunan, mudah diakses dan mutakhir berdasarkan satu data. a. Adaptif terhadap dinamika implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan b. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

		Peningkatan Kapasitas Inovasi	• Peningkatan iklim riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. a. Menyusun kebijakan yang menekankan proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset dan inovasi. b. Meningkatkan komitmen dan kesepahaman pelaku riset dan inovasi dengan pihak pengguna c. Meningkatkan sinergitas perencanaan riset dan inovasi melalui keterlibatan stakeholder terkait. • Peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan riset dan inovasi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah a. Meningkatkan proses riset dan inovasi yang aplikatif dalam mendukung kinerja Pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. b. Penguatan kapasitas SDM dalam bidang riset dan inovasi. c. Peningkatan sarana dan prasarana riset dan inovasi daerah • Optimalisasi implementasi hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah a. Melaksanakan regulasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk perencanaan pembangunan b. Peningkatan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
--	--	--------------------------------------	--



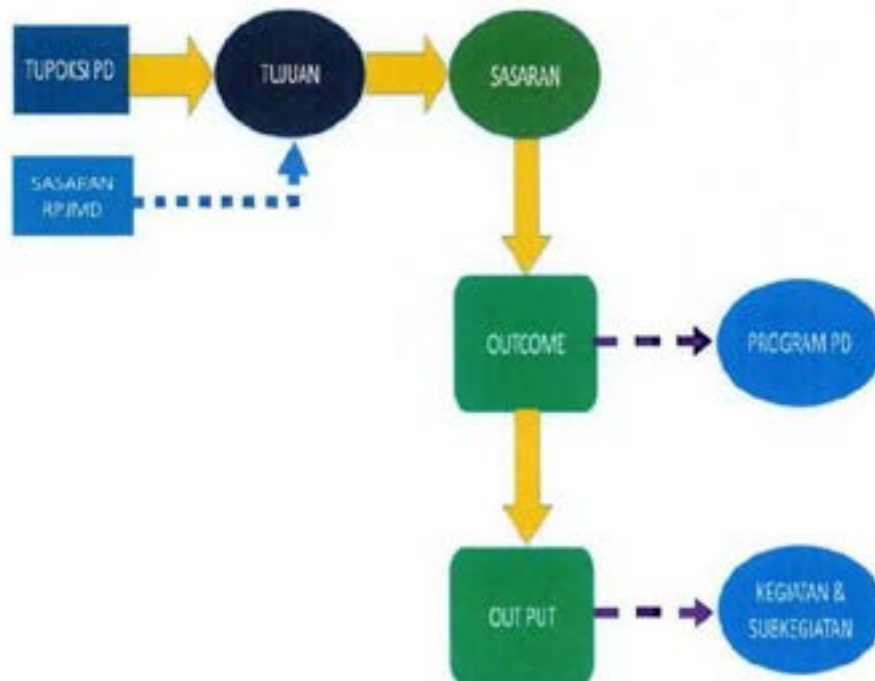
			• Peningkatan layanan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bapperida a. Optimalisasi kualitas dokumen perencanaan kinerja Bapperida b. Optimalisasi pemenuhan SOP yang mendukung kinerja Bapperida c. Peningkatan pemanfaatan IT dalam melaksanakan layanan tugas dan fungsi Bapperida d. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan tugas dan fungsi Bapperida e. Peningkatan kapasitas SDM Bapperida
--	--	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Bapperida Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Kebumen. Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas dan fungsi Bapperida adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Bapperida Kabupaten Kebumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUBKEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 5. Penyediaan Bahan/Material. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel. 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
B	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
D	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	



14	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
15	Invensi dan Inovasi	1. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi. 3. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah.

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANA AN					9.408. 851.01 8		9.674. 542.32 8		9.933 .947. 431		11.336 .564.7 37		11.166 .752.0 97	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					7.563. 851.01 8		7.793. 542.32 8		8.040 .947. 431		8.635. 564.73 7		8.611. 752.09 7	
Meningkatny a Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,9	77,92	77,94	7.563. 851.01 8	77,96	7.793. 542.32 8	77,98	8.040 .947. 431	78,00	8.635. 564.73 7	78,02	8.611. 752.09 7	5.01.5.05.0.00. 02.00 00 - BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89,77	90,30	90,4		90,45		90,50		90,55		90,60		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDAL IAN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH					935.00 0.000		953.00 0.000		959.0 00.00 0		1.465. 000.00 0		1.579. 000.00 0	
Meningkatny a Konsistensi dan Kekinambun g an Pembanguna n Daerah	Persentas e Konsisten si Program RKPD dengan APBD (%)	100	100	100	935.00 0.000	100	953.00 0.000	100	959.0 00.00 0	100	1.465. 000.00 0	100	1.579. 000.00 0	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINAS I DAN SINKRONISA SI PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH					910.00 0.000		928.00 0.000		934.0 00.00 0		1.236. 000.00 0		976.00 0.000	5.01.5.05.0.00. 02.00 00 - BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (%)	100	100	100	910.00 0.000	100	928.00 0.000	100	934.0 00.00 0	100	1.236. 000.00 0	100	976.00 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.280.000.000		1.304.000.000		1.309.000.000		1.915.000.000		1.339.000.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.280.000.000		1.304.000.000		1.309.000.000		1.915.000.000		1.339.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitas riset dan inovasi daerah (%)	100	100	100	1.280.000.000	100	1.304.000.000	100	1.309.000.000	100	1.915.000.000	100	1.339.000.000	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

Teknik merumuskan Program, Kegiatan hingga Subkegiatan pada Bapperida Kabupaten Kebumen diatur dalam Rencana Strategis pada Perangkat Daerah, yang dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatka n kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah				Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah (Nilai)		
					Kapabilitas Inovasi (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah			Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan: Nilai) IKM Perangkat Daerah (Satuan: Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Satuan: Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Satuan: Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun (Satuan: Kegiatan)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah (Satuan: Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dinamis pada SKPD (Satuan:Dokumen)		
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Liannya yang Disediakan (Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah (Satuan: Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Satuan: Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambunga n Pembangunan Daerah		Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Satuan: Persen)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (Satuan: Dokumen)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Satuan:Berita Acara)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Satuan:Dokumen)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan;Laporan)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (Satuan: Persen) Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Satuan: Persen)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Satuan: Urusan)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Satuan:Laporan)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perancaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Satuan: Urusan)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang tersusun (Satuan: Urusan)		
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan:Dokumen)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Meningkatnya penyelenggaraa n riset dan inovasi daerah			Indeks Inovasi Daerah (Inovasi)		
			Meningkatnya Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah		Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah (Satuan: %)	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Satuan: Dokumen)	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Satuan:Laporan)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitasi pengembangan invensi dan inovasi (Satuan: %)	Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Satuan:Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Inovasi (Satuan:Laporan)		
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Satuan:Laporan)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

4.2 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Uraian Subkegiatan yang menjelaskan hingga kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BAPPERIDA				10.688.851.018		10.978.542.328		11.242.947.431		13.251.564.737		12.505.752.097		
PERENCANAAN				9.408.851.018		9.674.542.328		9.933.947.431		11.336.564.737		11.166.752.097		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.563.85 1.018		7.793.54 2.328		8.040.94 7.431		8.635.56 4.737		8.611.75 2.097	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan: Nilai)	77,90	77,92	77,94		77,96		77,98		78,00		78,02		Sekretar iat
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Satuan: Indeks)	89,77	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Sekretar iat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					42.000.0 00		50.000.0 00		52.000.0 00		70.000.0 00		65.000.0 00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Satuan: Dokumen)	10	10	10		10		10		11		10		Kasuba g 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.0 00		35.000.0 00		36.000.0 00		50.000.0 00		40.000.0 00	Sub Kor

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														bidang A1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	7	8	6		6		6		8		6		Sub Kor bidang A1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.0 00		15.000.0 00		16.000.0 00		20.000.0 00		25.000.0 00	Sub Kor bidang A1
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	3	3	8		8		8		9		8		Sub Kor bidang A1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.027.35 1.018		6.214.04 2.328		6.454.44 7.431		6.713.56 4.737		6.902.75 2.097	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.008.25 3.176		6.191.61 1.244		6.430.82 8.078		6.688.22 7.191		6.872.68 1.480	Kasuba g 1
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/bulan)	30	50	57		57		57		57		57		Kasuba g 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					19.097.842		22.431.084		23.619.353		25.337.546		30.070.617	Kasubag 1
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubag 1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun (Satuan: Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag 1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000	Kasubag 1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	43	53	58		58		58		58		58		Kasubag 1
Administrasi Umum Perangkat Daerah					583.500.000		598.800.000		598.800.000		607.000.000		650.000.000	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah (Satuan: Bulan)													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.0 00		23.000.0 00		23.000.0 00		25.000.0 00		30.000.0 00	Kasuba g 1
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasuba g 1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					185.000. 000		188.000. 000		188.000. 000		190.000. 000		200.000. 000	Kasuba g 1
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					125.000. 000		128.000. 000		128.000. 000		130.000. 000		135.000. 000	Kasuba g 1
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					3.500.00 0		3.800.00 0		3.800.00 0		4.000.00 0		5.000.00 0	Kasuba g 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	3	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Bahan/Material					20.000.000		23.000.000		23.000.000		24.000.000		30.000.000	Kasuba g 1
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	3	6	4		4		4		4		4		Kasuba g 1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		210.000.000	Kasuba g 1
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	233	235	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000		33.000.000		33.000.000		34.000.000		40.000.000	Kasuba g 1
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasuba g 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					332.000.000		335.000.000		335.000.000		535.000.000		360.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Unit)	8	63	37		37		37		37		37		Kasubag 1
Pengadaan Mebel					90.000.000		120.000.000		120.000.000		220.000.000		130.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Unit)	-	58	20		20		20		20		20		Kasubag 1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					130.000.000		130.000.000		130.000.000		230.000.000		140.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	8	5	10		10		10		10		10		Kasubag 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					112.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		90.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	8		7		7		7		7		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					219.000.000		222.700.000		222.700.000		225.000.000		229.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah (Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.00 0		4.700.00 0		4.700.00 0		5.000.00 0		6.000.00 0	Kasuba g 1
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		Kasuba g 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					105.000. 000		108.000. 000		108.000. 000		110.000. 000		113.000. 000	Kasuba g 1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					110.000. 000		110.000. 000		110.000. 000		110.000. 000		110.000. 000	Kasuba g 1
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasuba g 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.000.000		338.000.000		343.000.000		445.000.000		355.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Satuan: Unit)	49	99	99		99		99		99		99		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					150.000.000		155.000.000		160.000.000		162.000.000		170.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	36	36	36		36		36		36		36		Kasubag 1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		85.000.000	Kasubag 1
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	12	49	49		49		49		49		49		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kasuba g 1
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan: Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasuba g 1
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					935.000.000		953.000.000		959.000.000		1.465.000.000		1.579.000.000	
Meningkatnya Konsistensi dan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Rendale v
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					725.000.000		737.000.000		741.000.000		1.243.000.000		1.347.000.000	
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (Satuan: Dokumen)	3	2	2		2		2		2		3		-
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					320.000.000		325.000.000		327.000.000		568.000.000		620.000.000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Satuan: Berita Acara)	4	2	2		2		2		2		4		-
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					405.000.000		412.000.000		414.000.000		675.000.000		727.000.000	-
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Satuan: Dokumen)	3	2	2		2		2		2		3		-
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	-
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	-
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Satuan: Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		-
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah (Satuan: Laporan)	2	1	2		2		2		2		2		-
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan)	2	1	2		2		2		2		2		-
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					910.000. 000		928.000. 000		934.000. 000		1.236.00 0.000		976.000. 000	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang PSDAI
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100	100	100		100		100		100		100		Bidang PPM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Manusia (Satuan: Persen)													
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					395.000. 000		404.000. 000		407.000. 000		513.000. 000		428.000. 000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Satuan: Urusan)	21	21	21		21		21		21		21		Sub Kor bidang A1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					105.000. 000		108.000. 000		109.000. 000		211.000. 000		116.000. 000	kasi a
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	staff pm
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Satuan: Laporan)	0	2	2		2		2		2		2		staff pm
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					185.000.000		188.000.000		189.000.000		191.000.000		196.000.000	staff pm
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	2	2	2		2		2		2		2		staff pm

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	RKPD) (Satuan: Dokumen)													
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					310.000. 000		316.000. 000		318.000. 000		462.000. 000		332.000. 000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Satuan: Urusan)	13	13	13		13		13		13		13		KETUA TIM 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					215.000. 000		218.000. 000		219.000. 000		321.000. 000		226.000. 000	kasi a
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					95.000.000		98.000.000		99.000.000		141.000.000		106.000.000	kasi a
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		kasi a
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					205.000.000		208.000.000		209.000.000		261.000.000		216.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun " (Satuan: Urusan)	8	8	7		7		7		7		7		KETUA TIM 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					205.000.000		208.000.000		209.000.000		261.000.000		216.000.000	kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2	2			2		2		2		kasi a
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.280.000.000		1.304.000.000		1.309.000.000		1.915.000.000		1.339.000.000		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.280.000.000		1.304.000.000		1.309.000.000		1.915.000.000		1.339.000.000	
Meningkatnya Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitas riset dan inovasi daerah (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Litbang
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					825.000.000		840.000.000		842.000.000		1.442.000.000		852.000.000	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Satuan: Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		-
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan					825.000.000		840.000.000		842.000.000		1.442.000.000		852.000.000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Satuan: Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		-
Invensi dan Inovasi					455.000.000		464.000.000		467.000.000		473.000.000		487.000.000	-
Terlaksananya Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitas pengembangan invensi dan inovasi (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual					130.000.000		133.000.000		134.000.000		136.000.000		141.000.000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					215.000.000		218.000.000		219.000.000		221.000.000		226.000.000	-
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah					110.000.000		113.000.000		114.000.000		116.000.000		120.000.000	-
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar	2	2	2		2		2		2		2		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kelembagaan (Satuan: Laporan)													

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan disajikan dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi dan Kesiambungan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Mendukung Program Unggulan



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
3.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Mendukung Program Unggulan Bupati Muda Kreatif (Anake Biyunge)
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan target pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi tolak ukur utama keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis, sekaligus memperkuat akuntabilitas serta budaya kerja berbasis hasil dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah disajikan dalam Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indikator Tujuan								
a.	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	23,10	23,43	23,73	24,31	24,41	24,71	
b.	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,97	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	
2.	Indikator Sasaran (Urusan Perencanaan)								
a.	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Nilai	23,20	23,50	23,80	24,40	24,50	24,80	
3.	Indikator Sasaran (Urusan Penelitian dan Pengembangan)								
a.	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini memaparkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah sesuai kewenangan perangkat daerah, serta memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Indikator Kinerja Kunci disajikan dalam Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a.	Perencanaan								
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
b.	Penelitian dan Pengembangan								
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	73,00	75,50	78,00	80,50	83,00	85,50	
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1	1	1	1	1	1	

Sumber : Bapperida Kebumen, 2025

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran layanan serta pendanaan indikatif.

Dokumen ini diharapkan bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan tugas dan fungsi Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran PD. Dalam implementasi Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Catatan Penting

- Penyusunan Renstra Bapprida kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 merupakan pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Rumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renstra Bapprida Kabupaten Kebumen pada prinsipnya sudah dilakukan sinkronisasi dengan proyek prioritas nasional dan program Provinsi Jawa Tengah serta mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029;
- Permasalahan dan Isu Strategis terkait dengan bidang urusan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan selanjutnya akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Kebumen.

c. Rencana Tindak Lanjut

- o Memastikan kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan serta komitmen semua unsur;
- o Melaksanakan sosialisasi dokumen Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 kepada seluruh pegawai, mitra kerja serta pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen;
- o Melaksanakan pengendalian dan evaluasi untuk menjamin dan memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra dalam setiap tahunnya. Dalam hal ini Renstra perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Renstra Bapperida Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 diharapkan menjadi pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkup urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat Perangkat Daerah, masyarakat, Kabupaten dan memberikan dampak positif dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Bapperida Kabupaten Kebumen

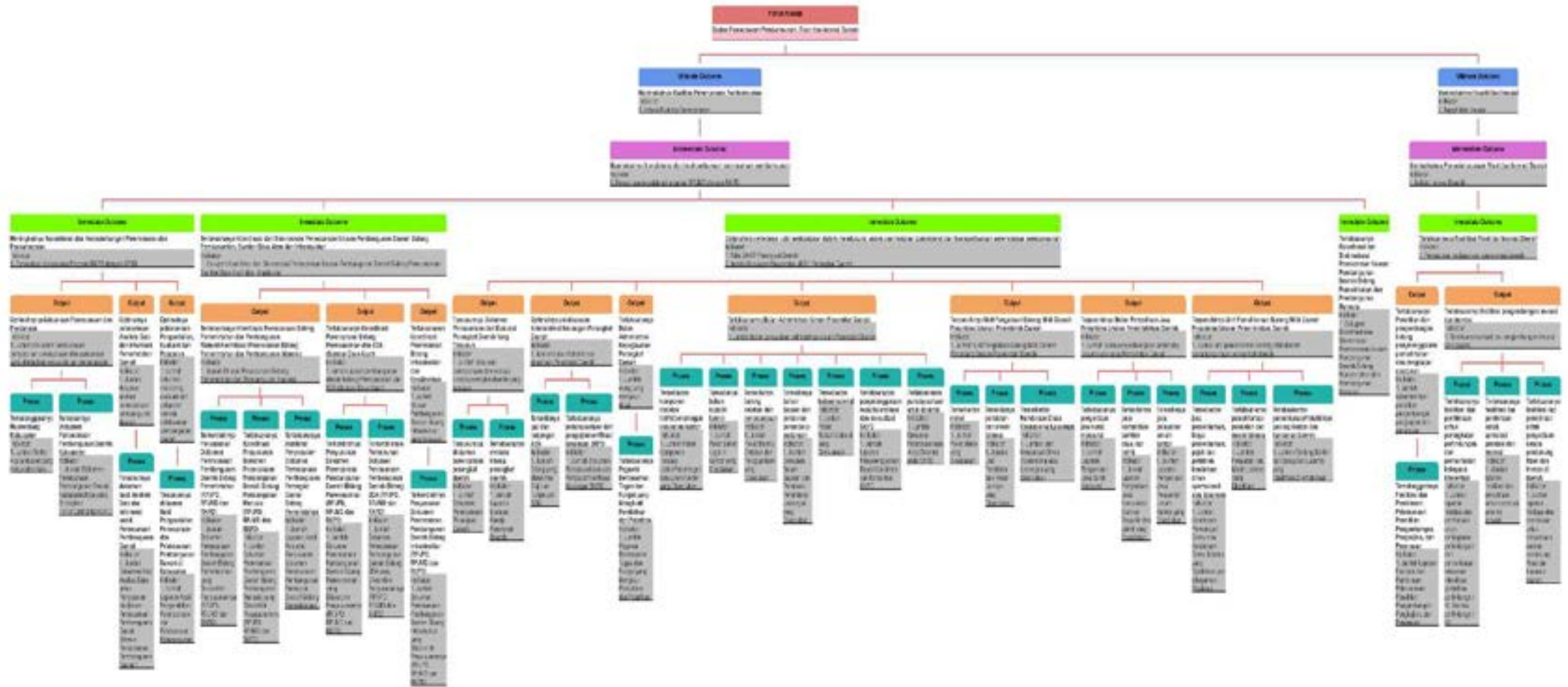


BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I /IV b
NIP. 198608252004121002

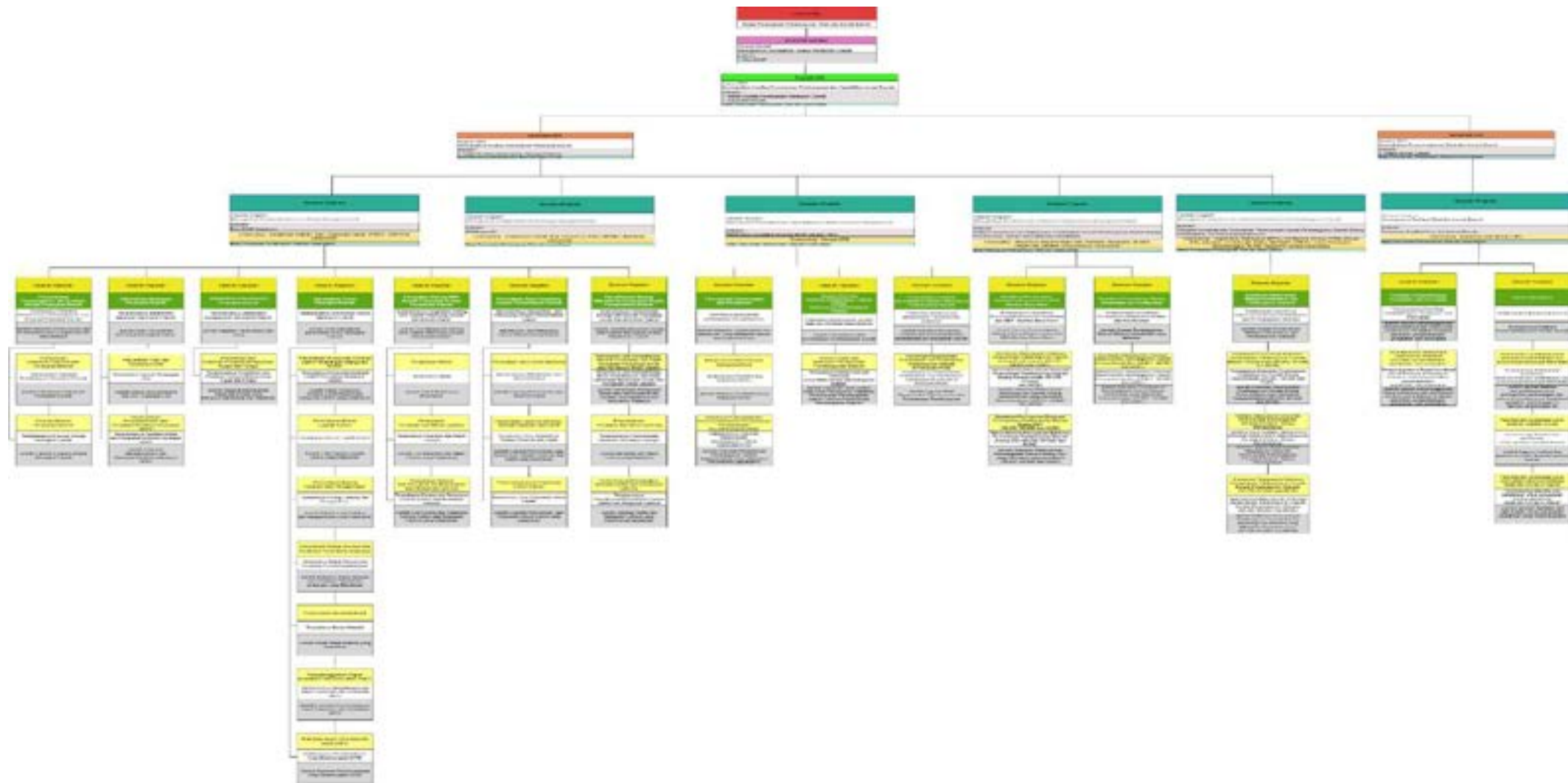
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Apa Sutyaningrum	
Hendari Mattadewi	

1. Pohon Kinerja
2. Casecading
3. Rencana Program, Kegiatan,
Subkegiatan beserta pendanaan
4. IKK
5. Rumus Perhitungan Indikator
6. SK Penyusunan Renstra
7. Pelaksanaan Forum Renstra

POHON KINERJA



CASCADING



Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				10.688.851.018		10.978.542.328		11.242.947.431		13.251.564.737		12.505.752.097		
PERENCANAAN				9.408.851.018		9.674.542.328		9.933.947.431		11.336.564.737		11.166.752.097		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.563.851.018		7.793.542.328		8.040.947.431		8.635.564.737		8.611.752.097	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan: Nilai)	77,90	77,92	77,94		77,96		77,98		78,00		78,02		Sekretariat
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Satuan: Indeks)	89,77	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Sekretariat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					42.000.000		50.000.000		52.000.000		70.000.000		65.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10	10	6		6		6		6		6		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Satuan: Dokumen)													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.0 00		35.00 0.000		36.000. 000		50.000. 000		40.00 0.000	Sub Kor bidang A1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	7	8	6		6		6		8		6		Sub Kor bidang A1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.0 00		15.00 0.000		16.000. 000		20.000. 000		25.00 0.000	Sub Kor bidang A1
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	3	3	8		8		8		9		8		Sub Kor bidang A1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.027.35 1.018		6.214 .042. 328		6.454.4 47.431		6.713.5 64.737		6.902 .752. 097	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.008.253.176		6.191.611.244		6.430.828.078		6.688.227.191		6.872.681.480	Kasubag 1
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/bulan)	30	50	57		57		57		57		57		Kasubag 1
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					19.097.842		22.431.084		23.619.353		25.337.546		30.070.617	Kasubag 1
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun (Satuan: Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag 1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000	Kasubag 1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	43	53	58		58		58		58		58		Kasubag 1
Administrasi Umum Perangkat Daerah					583.500.000		598.800.000		598.800.000		607.000.000		650.000.000	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Satuan: Bulan)													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.0 00		23.00 0.000		23.000. 000		25.000. 000		30.00 0.000	Kasubag 1
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag 1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					185.000. 000		188.0 00.00 0		188.00 0.000		190.00 0.000		200.0 00.00 0	Kasubag 1
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					125.000. 000		128.0 00.00 0		128.00 0.000		130.00 0.000		135.0 00.00 0	Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.500.000		3.800.000		3.800.000		4.000.000		5.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	3	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Bahan/Material					20.000.000		23.000.000		23.000.000		24.000.000		30.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	3	6	4		4		4		4		4		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000. 000		200.0 00.00 0		200.000 .000		200.000 .000		210.0 00.00 0	Kasubag 1
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	233	235	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.0 00		33.00 0.000		33.000. 000		34.000. 000		40.00 0.000	Kasubag 1
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag 1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					332.000. 000		335.0 00.00 0		335.00 0.000		535.00 0.000		360.0 00.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Unit)	8	63	37		37		37		37		37		Kasubag 1
Pengadaan Mebel					90.000.000		120.000.000		120.000.000		220.000.000		130.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Unit)	-	58	20		20		20		20		20		Kasubag 1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					130.000.000		130.000.000		130.000.000		230.000.000		140.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	8	5	10		10		10		10		10		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					112.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		90.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	8		7		7		7		7		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					219.000.000		222.700.000		222.700.000		225.000.000		229.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah (Satuan: Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000		4.700.000		4.700.000		5.000.000		6.000.000	Kasubag 1
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	12	12	4		4		4		4		4		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					105.000.000		108.000.000		108.000.000		110.000.000		113.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag 1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					330.000.000		338.000.000		343.000.000		445.000.000		355.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Satuan: Unit)	49	99	99		99		99		99		99		Kasubag 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					150.000.000		155.000.000		160.000.000		162.000.000		170.000.000	Kasubag 1
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	36	36		36		36		36		36		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Satuan: Unit)													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.000.0 00		83.00 0.000		83.000. 000		83.000. 000		85.00 0.000	Kasubag 1
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	12	49	49		49		49		49		49		Kasubag 1
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000. 000		100.0 00.00 0		100.00 0.000		100.00 0.000		100.0 00.00 0	Kasubag 1
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i (Satuan: Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag 1

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					935.000. 000		953.0 00.00 0		959.00 0.000		1.465.0 00.000		1.579 .000. 000	
Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Rendalev
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					725.000. 000		737.0 00.00 0		741.00 0.000		1.243.0 00.000		1.347 .000. 000	
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaa n dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundanga n (Satuan: Dokumen)	3	2	2		2		2		2		3		-
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					320.000. 000		325.0 00.00 0		327.00 0.000		568.00 0.000		620.0 00.00 0	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Satuan: Berita Acara)	4	2	2		2		2		2		4		-
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					405.000.000		412.000.0000		414.000.000		675.000.000		727.000.0000	-
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Satuan: Dokumen)	3	2	2		2		2		2		3		-
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					105.000.000		108.000.0000		109.000.000		111.000.000		116.000.0000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		-
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	-
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Satuan: Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		-
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Daerah														
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah (Satuan: Laporan)	2	1	2		2		2		2		2		-
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	-
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan)	2	1	2		2		2		2		2		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					910.000. 000		928.0 00.00 0		934.00 0.000		1.236.0 00.000		976.0 00.00 0	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisas i Perencanaa n Urusan Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an, Sumber Daya Alam dan Infrastrukt ur (Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang PSDAI
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisas i Perencanaa n Urusan Pembangun an Daerah Bidang Pemerintah an dan	100	100	100		100		100		100		100		Bidang PPM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangun an Manusia (Satuan: Persen)													
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					395.000. 000		404.0 00.00 0		407.00 0.000		513.00 0.000		428.0 00.00 0	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	Jumlah Urusan Perencanaa n Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia (Satuan: Urusan)	21	21	21		21		21		21		21		Sub Kor bidang A1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					105.000. 000		108.0 00.00 0		109.00 0.000		211.00 0.000		116.0 00.00 0	kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		kasi a
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					105.000.000		108.000.000		109.000.000		111.000.000		116.000.000	staff pm
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	2	2		2		2		2		2		staff pm

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n (Satuan: Laporan)													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					185.000. 000		188.0 00.00 0		189.00 0.000		191.00 0.000		196.0 00.00 0	staff pm
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Bidang Pembanguna n Manusia yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		staff pm
Koordinasi Perencanaan Bidang					310.000. 000		316.0 00.00 0		318.00 0.000		462.00 0.000		332.0 00.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumah urusan pembangun an daerah bidang Perekonomi an dan SDA (Sumber Daya Alam) (Satuan: Urusan)	13	13	13		13		13		13		13		KETUA TIM 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					215.000.000		218.000.000		219.000.000		321.000.000		226.000.000	kasi a
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia n yang Dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan	2	2	2		2		2		2		2		kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	RKPD) (Satuan: Dokumen)													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					95.000.000		98.000.000		99.000.000		141.000.000		106.000.000	kasi a
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		kasi a
Koordinasi Perencanaan Bidang					205.000.000		208.000.000		209.000.000		261.000.000		216.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Infrastruktur dan Kewilayahan														
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun " (Satuan: Urusan)	8	8	7		7		7		7		7		KETUA TIM 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					205.000.000		208.000.000		209.000.000		261.000.000		216.000.000	kasi a
Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	2	2			2		2		2		kasi a

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Satuan: Dokumen)													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.280.00 0.000		1.304 .000. 000		1.309.0 00.000		1.915.0 00.000		1.339 .000. 000	
Meningkatnya Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitas riset dan inovasi daerah (Dengan Satuan: Persen)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Litbang
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					825.000. 000		840.0 00.00 0		842.00 0.000		1.442.0 00.000		852.0 00.00 0	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan	10	10	10		10		10		10		10		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penerapan (Satuan: Dokumen)													
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					825.000.000		840.000.000		842.000.000		1.442.000.000		852.000.000	-
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Satuan: Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		-
Invensi dan Inovasi					455.000.000		464.000.000		467.000.000		473.000.000		487.000.000	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitasi pengemban gan invensi dan inovasi (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual					130.000. 000		133.0 00.00 0		134.00 0.000		136.00 0.000		141.0 00.00 0	-
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindunga n dan pemanfaata n kekayaan intelektual (pelatihan perlindunga n KI, fasilitas perlindunga n KI) (Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					215.000.000		218.000.000		219.000.000		221.000.000		226.000.000	-
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah					110.000.000		113.000.000		114.000.000		116.000.000		120.000.000	-
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Satuan: Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		-

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a	Perencanaan								
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
b.	Penelitian dan Pengembangan								
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	73,00	75,50	78,00	80,50	83,00	85,50	
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1	1	1	1	1	1	

RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER
TUJUAN						
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah	Nilai	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
		Kapabilitas Inovasi	Nilai	Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, dan mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah	Angka dari BRIN Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan	Badan Riset dan Inovasi Nasional.



NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER
					lembaga riset, aplikasi merek dagang	
SASARAN						
1	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana hasil evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan	Inspektorat Daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER
2	Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.	Angka dari Kemendagri : IID = SPD + SID (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah)	Kementerian Dalam Negeri.
PROGRAM						
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah	Nilai Indeks	-	Nilai SAKIP OPD berdasarkan penilaian dari Itda sesuai Perbup Evaluasi Kinerja Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, berupa Lembar Kerja Evaluasi/LHE dengan 4 komponen: 1. Perencanaan (bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (bobot 15) 4. Evaluasi kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen



NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER
					(bobot 25) IKM : Berdasarkan PermenPANRB No 17 Tahun 2017 Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur	
2	Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Persen	-	(Jumlah program di APBD tahun n dibagi jumlah program di RKPD tahun n) dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen



NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER
3	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Persen	-	Jumlah urusan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dibagi jumlah urusan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur , dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
		Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	Jumlah urusan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
4	Meningkatnya Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitas riset dan inovasi daerah	Persen	-	(Persentase fasilitas litbangjirap + Persentase Fasilitas Pengembangan Inovasi dan Inovasi), dibagi 2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Telepon (0287) 381570 Faksimile (0287) 381570
Pos-el : bappeda@kebumenkab.go.id
Laman : bappeda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.2/1732 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 11 Juni 2025



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.722/1732 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
6.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
9.	Ketua Tim Kerja Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
10.	Ketua Tim Kerja Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
11.	Ketua Tim Kerja Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
12.	Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
13.	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
14.	Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
15.	Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
16.	Ketua Tim Kerja Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
17.	Ketua Tim Kerja Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
18.	Ketua Tim Kerja Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
19.	7 (tujuh) orang Staf pada pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Dwi Susanti, SE. 2. Fajar Nur Rahman, S.Kom. 3. Febi Dwi Andriansyah, S.Kom. 4. Zidni Taqiya Perdana, S.KM. 5. Kiki Indra Risa, S.Ak. 6. Suci Prasetyowati, S.S. 7. Zakiyal Fikri, S.T.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.72.2/1732 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	3 (tiga) orang Staf pada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Niken Novitasari Prabandani, SE 2. Bambang Sardi 3. Kasim, S.AP.



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAHRUN MUNAWIR



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen

Telepon (0287) 381570 Faksimile (0287) 381570

Pos-el : bappeda@kebumenkab.go.id

Laman : bappeda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

LAPORAN HASIL FORUM RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai pasal 136 dan pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah, sebagai rangkaian tahapan dalam proses penyusunan Rencana (Renstra) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan masukan dari stakeholders atas rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang telah disusun.

B. Landasan Hukum

1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 000.7.2/789 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Serta Petunjuk Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diselenggarakannya Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- b. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;

- d. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- e. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif dan prioritas pembangunan daerah serta berbagai regulasi yang terkait pada Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

III. PENYELENGGARAAN FORUM RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal	: Jum'at, 14 Maret 2025
Waktu	: Pukul 08.00 s.d 11.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Nusantara Lantai I Bappeda Kabupaten Kebumen
Peserta	: Perwakilan Perangkat Daerah terkait, Kabag Organisasi Setda, Perwakilan Kecamatan, BPS, BRIN Karangsembung, Pimpinan Perguruan Tinggi (Unimugo, UPB, UMNU, IAINU), Ketua Komite Ekraf Kabupaten Kebumen, General Manager BP Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua LSM Formasi Kabupaten Kebumen, Ketua Migrant Care Kebumen, Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen, Direktur Piksi Ganesha Indonesia Kebumen, Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kebumen serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen
Narasumber	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen,

**IV. TAHAPAN KEGIATAN FORUM RENCANA STRATEGIS BAPPEDA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**

Tahapan kegiatan Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Kebumen
3. Pembacaan Doa
4. Laporan Penyelenggara
5. Pembacaan dan Penyepakatan Tata Tertib
6. Pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
7. Paparan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 dan Renja Bappeda Tahun 2026 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen.
8. Paparan Kerangka Keuangan Kabupaten Kebumen pada rancangan awal RPJMD 2025-2029 oleh Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Kebumen
9. Diskusi, Tanya jawab dan Kesepakatan
10. Pembahasan dan Tanggapan dari Narasumber
11. Pemilihan Delegasi Forum Perangkat Daerah
12. Penandatanganan Berita Acara Forum Perangkat Daerah
13. Penutup.

**V. HASIL FORUM RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**

1. Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan dengan lancar dan baik.
2. Jumlah pagu anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No	Unsur	Anggaran					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
		Tahun 2026 (000)	Tahun 2027 (000)	Tahun 2028 (000)	Tahun 2029 (000)	Tahun 2030 (000)			
1	Unsur Perencanaan	10.388.629	10.038.344	11.245.867	11.219.998	11.372.114	3 Program	13 Kegiatan	31 Sub Kegiatan
2	Unsur Penelitian dan Pengembangan	1.464.459	1.537.683	1.614.569	1.695.300	1.780.067	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan

3. Hal teknis dalam Proses diskusi tanya jawab yang menjadi masukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:
 - a. Riset terkait urusan, mohon ditambah tentang kebumian untuk mencegah bencana contohnya kejadian banjir di sumberadi
 - b. Program Unggulan Koperasi merah putih, kenapa bumdes tidak disinggung padahal sudah berjalan dan ber Badan Hk, mungkin perlu pengawalan, perlu ada pihak swasta yg menangani Bumdes.
 - c. Program Unggulan ASN ngayomi, mohon untuk segera diimplementasikan
 - d. Terkait kondisi kemiskinan semoga disebabkan karena data yang belum jujur
 - e. Perlu adanya inovasi ramah lingkungan, himbauan karangan bunga diganti dengan bibit pohon/ uang
 - f. Terkait penelitian dan pengembangan untuk melibatkan dosen-dosen dan perlunya meningkatkan kolaborasi kampus lokal
 - g. Perlunya data subsector ekokraf, karena belum ada support data utamanya pelaku ekokraf, sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata
 - h. Pernah melakukan survey 116 pelaku batik, ternyata pendapatan hanya 1 juta sebulan
 - i. Hasil Kegiatan secara lengkap disampaikan dalam Notulen Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VI. PENUTUP

Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai salah satu tahapan kegiatan proses penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Prioritas Kegiatan dan Subkegiatan yang

direncanakan dengan tujuan pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Masukan dan saran Forum Rencana Strategis akan dilaksanakan dengan memperbaiki penajaman indikator pada kegiatan dan subkegiatan, sehingga kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dapat tercapai. Demikian laporan hasil Forum Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen



Bahrin Munawir, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV-b
NIP. 19860825 200412 1 002

**DOKUMENTASI FORUM RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029**









**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**

Pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen, Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, BPKPD Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2025
Jam : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Nusantara Lantai 1 Bappeda Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah . Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 14 Maret 2025

Pimpinan Sidang
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen


BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	TANDA TANGAN
1.	Dra. Maria Margaretha Sri Kuntarti, M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen	Kebumen	
2.	Haris Setyawan, S.Kom, M.SE.	BPKPD Kabupaten Kebumen	Kebumen	
3.	Drs. Udy Cahyono, M.Si.	BPBD Kabupaten Kebumen	Kebumen	
4.	Arif Rahmadi, S.Sos.	Kecamatan Ayah	Kebumen	
5.	Dr. Herniyatun, M.Kep., Sp.Mat.	Universitas Muhammadiyah Gombong	Gombong	

DELEGASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	Sigit Tri Prabowo, S.Pd.	Badan Pengelola Geopark Kebumen	Kebumen	

**DAFTAR HADIR FORUM RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029
DAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2026**

KABUPATEN : Kebumen
TANGGAL : 14 Maret 2025
TEMPAT : Ruang Rapat Nusantara Lantai 1 Bappeda Kabupaten Kebumen

NO	N A M A	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN	
1	Bahrin Munawir, S.STP, M.si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		1	
2	Yunita Prasetyani, S.E., M.A., M.Ec.Dev	Sekretaris		2	
3	Agus Setyawan, S.E., M.E	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3	
4	Ika Fitriani, S.Si, M.Sc	Kabid Penelitian dan Pengembangan		4	
5	Cahyo Ngadmanto, SH	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5	
6	Krima Karmila, S.Sos, M.Eng	Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur		6	
7	Tauhid, S.E	Perencana Ahli Muda	Kebumen	7	
8	Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd	Perencana Ahli Madya	Gombong	8	
9	Dyah Mustika P, ST., M.Ling	Perencana Ahli Muda		9	
10	Iin Latifah, ST	Analisis Perencanaan	De Denderwati	10	
11	Jinggarani Rosmala Dewi, S.IP, MPA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Banurejo	11	
12	Aulia Ni'matu Fajar, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kebumen	12	
13	Cahyo Riyadi, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	Perencana Ahli Muda	Kebumen	13	
14	Eka Idham I.I.P.K.Lewa, S.T, M.M.	Perencana Ahli Muda	Jatijajar	14	
15	Hantari Mahadewi, S.P	Perencana Ahli Muda	Kebumen	15	
16	Rahmat Nunwidodo, S.STP., M.Sc	Analisis Perencanaan	Rij	16	
17	Defita Panji Asmara, S.Ak	Kasubag Keuangan		17	
18				18	
19	Ika P	Litbang	Sarangbani	19	
20	Linky	Rendatav	Kebumen	20	
21	Agus Widi	Rendatav	Klirong	21	
22	Anie S	Rendatav	Kebumen	22	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
23	Kasim	Bappeda	Pecahi.	23
24	Bambang	Bappeda	Kebumen	24
25	MIKEU	Bappeda	Kecamatan	25
26	NARONG WYANT	-	Kebumen	26
27	YUSUP Cukman	Bappeda	BULUS	27
28	Idris P.	Bappeda	Kebumen	28
29				29
30	Aris	DANTEAN	Kebumen	30
31	Skhmadri	BAPPEDA	Kebumen	31
32	Suci P	Bappeda		32
33	Umay	Bappeda	Adinulyo	33
34	Zakrya I F.	Bappeda		34
35	Dhany Durya	Bappeda	Brambang	35
36	Aris E	Bappeda	Kartajaya	36
37	Ari. K	Bappeda	Kebumen	37
38	Burhanuhalin	Bappeda	Kebumen	38
39	Kiki Indan Rini	Bappeda	Kebumen	39
40	M. Dikrofi	Bappeda	Kebumen	40
41	Fauzi Arsyad	Bappeda	Kebumen	41
42	Sheela	Bappeda	Kebumen	42
43	Dhany	Bappeda	Kebumen	43
44	.			44
45	TANI	Bappeda	Kebumen	45

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen

Bahrun

Bahrun Munawir, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV-b
NIP: 19860825 200412 1 002

**DAFTAR HADIR FORUM RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029
DAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2026**

KABUPATEN : Kebumen
TANGGAL : 14 Maret 2025
TEMPAT : Ruang Rapat Nusantara Lantai 1 Bappeda Kabupaten Kebumen

NO	N A M A	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen		1
2		Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen		2
3	Umu S	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen		3
4	Rusma W	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		4
5	UDY CAHYANO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kebumen,	5
6	Hani's S	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kebumen	6
7		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		7
8	Endah Erianti	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	08112604604	8
9	Iga Dofyoh	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan		9
10	Siti Rorika	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	08132701736	10
11	Auriah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0810505444	11
12	Azzul Ridwan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	081327531797	12
13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		13
14	Apifah I	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	081325444010	14
15	Mauliah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	081327982731	15
16	Arif Kurnawan	Dinas Pertanian dan Pangan	087037674949	16
17	Eko Proctofo	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	087727929015	17
18	Tri Rianto	Bagian Organisasi Setda Kebumen	081915057767	18
19	Sukhya Eda S	Kecamatan Alian	081322675030	19
20	Arif R	Kecamatan Ayah	Ayah	20
21	B.C. Afwaji	Kecamatan Buayan	085220688456	21
22	Sucipto Birowo	Kecamatan Gombang		22

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
23	<i>Irwan</i>	Kecamatan Karanganyar	<i>0878277862</i>	23 <i>[Signature]</i>
24	<i>Pradipito</i>	Kecamatan Karanggayam		24 <i>[Signature]</i>
25	<i>SINUNO</i>	Kecamatan Karangsambung	<i>081322067999</i>	25 <i>[Signature]</i>
26	<i>Kar-janto</i>	Kecamatan Kebumen	<i>081315017190</i>	26 <i>[Signature]</i>
27	<i>M. Yudianto</i>	Kecamatan Prembun	<i>08574789179</i>	27 <i>[Signature]</i>
28	<i>Kasukan</i>	Kecamatan Sadang	<i>Sadang</i>	28 <i>[Signature]</i>
29	<i>B. Sudirman</i>	Kecamatan Sempor	<i>Sempor</i>	29 <i>[Signature]</i>
30	<i>Mulyo Kridodo</i>	Kepala BPS Kabupaten Kebumen	<i>08136019131</i>	30 <i>[Signature]</i>
31		Ketua BRIN Karangsambung		31 <i>[Signature]</i>
32	<i>Aris Sekyanti</i>	<i>PEKKA</i>	<i>Karanggayam</i>	32 <i>[Signature]</i>
33	<i>Dewi IC</i>	<i>Aspirasi Warga</i>		33 <i>[Signature]</i>
34	<i>A.N. Sami</i>	<i>Dpmptsp</i>	<i>Kebumen</i>	34 <i>[Signature]</i>
35	<i>Sekar Arum</i>	<i>Dinsos P3A</i>	<i>Kebumen</i>	35 <i>[Signature]</i>

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen

Munawir

Bahrin Munawir, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV-b
NIP: 19860825 200412 1 002

**DAFTAR HADIR FORUM RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029
DAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2026**

KABUPATEN : Kebumen
TANGGAL : 14 Maret 2026
TEMPAT : Ruang Rapat Nusantara Lantai 1 Bappeda Kabupaten Kebumen

NO	N A M A	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Harini Abrisa S.	Universitas Putra Bangsa Kebumen	Jl. Ronggomartono	1
2	Herniyani	Universitas Muhammadiyah Gombong	Gombong	2
3	Remandi L.A	UMNU Kebumen	Jl. Jatisari	3
4	Benny Hurnawan	IAINU Kebumen	K. Tentara Pelajar	4
5	Sony Partiaji B	Piksi Ganesha Indonesia Kebumen	Kbm	5
6	Kabul Triyanti	Komite Ekraf Kabupaten Kebumen	KGB	6
7	Sigit Sri P	BP Geopark Kabupaten Kebumen	Kbm	7
8	Yazid Maulana	Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen	Kbm	8
9	Eti Rochanah	LSM Formasi Kabupaten Kebumen	Rijigani 082138113709	9
10	Nur R. Jannah	Migrant Care Kebumen	Buayan 085799357499	10
11	Alifah Silvana L.	Forum Anak Kabupaten Kebumen	Tugu RT 03/RW 03	11
12	Wenti Yulionh	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kebumen	Karangregu RT 06/02	12
13	Saadatul Umami	Forum Anak Kebumen	Sempur, karut 03/01	13
14				14
15				15
16				16

NO	N A M A	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN	
17				17	
18				18	
19				19	
20				20	

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen



Bahrun Munawir, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV-b
NIP: 19860825 200412 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Telepon (0287) 381570 Faksimile (0287) 381570
Pos-el : bappeda@kebumenkab.go.id
Laman : bappeda.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

NOTULEN -

FORUM PERANGKAT DAERAH BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Bersama ini kami sampaikan Laporan Forum Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

I. DASAR :

Surat Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, Nomor 000.7.2 / 193 / 2025 Tanggal 12 Maret 2025 Perihal Undangan.

II. WAKTU DAN TEMPAT :

Forum Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 di Ruang Rapat Nusantara Lantai I Bappeda Kabupaten Kebumen

III. PESERTA :

Forum Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dihadiri Perwakilan Perangkat Daerah terkait, Kabag Organisasi Setda, Perwakilan Kecamatan, BPS, BRIN Karangsembung, Pimpinan Perguruan Tinggi (Unimugo, UPB, UMNU, IAINU), Ketua Komite Ekraf Kabupaten Kebumen, General Manager BP Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua LSM Formasi Kabupaten Kebumen, Ketua Migrant Care Kebumen, Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen, Direktur Piksi Ganesha Indonesia Kebumen, Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kebumen serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional pada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

IV. HASIL:

1. Acara dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen (Bahrin Munawir, S.STP., M.Si.

2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Forum OPD adalah :

Maksud : Maksud diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

- Tujuan : Tujuan diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah adalah:
- a. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
 - b. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
 - d. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
 - e. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
 - f. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif dan prioritas pembangunan daerah serta berbagai regulasi yang terkait pada Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

3. Pleno Forum (Moderator Ibu Krina Karmila, S.Sos, M.Eng) :

a. Pembacaan tata Tertib forum

b. Paparan Sekda diwakili Ibu Asisten 2:

- Visi Misi dan prioritas pembangunan daerah kabupaten kebumen
- Perencanaan pembangunan disinkronkan dengan prioritas nasional (astacita)
- Regulasi perencanaan pembangunan
- Target 10 Agt 2025, penetapan Perda RPJMD, maksimal 1 bulan disusuli Renstra
- Forum Renstra dijadwalkan 14 – 27 Maret 25, 14 April pelaksanaan Verifikasi Renstra, penetapan renstra 18 -19 Sept 25
- Gambaran Kondisi Umum Kabupaten Kebumen (Kemiskinan, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini)
- Gambaran Ekonomi Kabupaten Kebumen

- Proyeksi keuangan daerah
- Permasalahan dan Isu strategis
- Visi Misi Program Unggulan

c. Paparan Renstra dan Renja Bappeda oleh Kepala Bappeda :

- Evaluasi kinerja Bappeda (Utamanya terkait sasaran OPD litbang)
- Isu strategis Bappeda : (sinkronisasi dokumen perencanaan, inovasi, pelayanan publik)
- Bappeda mendukung misi ke 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayemi, dilakukan dengan progul Biyunge momong, Ngobrol dan Rembug bareng Biyunge, Muda Kreatif, Lingkungan Bersih Lestari, Plesir Bareng Biyunge.
- Penajaman di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (data)
- Peran Bappeda dalam intervensi penyusunan dokumen RTRW, dalam beberapa urusan
- Bagaimana mngembangkan potensi kebumen secara optimal
- Isu Strategis Bappeda (Gulkin, akuntabilitas , inovasi, geopark)
- Tujuan dan sasaran Bappeda, target kinerja
- Mohon dukungan support dalam meningkatkan kinerja Bappeda dari semua pihak, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan

d. Diskusi

SESI 1

- BPBD (Pak Udi Cahyono) :
 - a) Riset terkait urusan, mohon ditambah tentang kebumen untuk mencegah bencana contohnya kejadian banjir di sumberadi
 - b) Mohon riset terkait ancaman bencana, selama ini sering droping air
 - c) Ada bidang rekon bencana, mohon untuk dokumen bencana R3P dimasukkan ke sistem dokumen perencanaan
 - d) Mohon penambahan sarpras penangan bencana
- Camat Kebumen (Karyanto)
 - a) Program unggulan , koperasi merah putih, kenapa bumdes tidak disinggung, padahal sudah berjalan dan ber Badan Hk, mungkin perlu pengawalan, perlu ada pihak swasta yg menangani bumdes.
 - b) Arah kebijakan bumdes kemana padahal asetnya sangat besar, mohon diberi kesempatan melakukan pengadaan2 e katalog, bias mendukung gulkin
- UPB (Lia)

Bappeda sudah melibatkan PT dalam riset, mphon ada jaringan kelitbangan untuk dikembangkan, dlm upaya gulkin. Ada banyak peluang yg bias memberikan hibah/ bantuan, bumdes kurang terbantu dalam pengadaan

Peta prioritas **kosa bangsa** dari prov, kebumen tdk ada

#Tanggapan

- Kepala Bappeda : Riset terkait mitigasi bencana akan kita support juga pemenuhan sarpras OP. Perlu strategi agar Bumdes berdaya dimana Bumdes dilindungi UU, bias besar karena berani investasi penyertaan modal dari DD juga besar. Potensi daerah perlu dikembangkan, ikhtiar sebaik mungkin dengan meningkatkan brandwiche pemasaran. ASN dan akademisi bela beli UMKM. Perlu pemetaan permasalahan daerah disoundingkan ke jarlit.
- Ass2 : Progul bumdes, penyertaan modal dari DD juknis dr pusat, pengadaan e katalog bisa diupayakan
- Inspektorat Daerah (Pak Ibnu) : 2024 pemeriksaan kinerja bumdes, dari 10 tidak ada yg nilainya 60. Tahun 2025 terjadwal periksa bumdes kr sari. Koperasi desa tetap hrs jln, kepmendes 1 dan 2 bertentangan mengganggu penyusunan perbup. Pembinaan bumdes di camat.
- BPKPD (Pak Haris) : Beberapa Arah kebijakan belanja daerah : Mengedepankan money follow program priority meliputi :
 - a) Pemenuhan aspek layanan dasar (pemenuhan SPM)
 - b) Pencapaian Target/ sasaran RPJMD
 - c) Pemenuhan mandatory spending (Belanja pegawai maksimal 30%, belanja pendidikan 20%, belanja infrastruktur pelayanan public 40%, belanja minimal terhadap penerimaan pajak daerah dan DBH Pajak Rokok
 - d) Peningkatan kapasitas ASN
 - e) Pengawasan (APIP)

Perlu adanya kajian tematik terkait kebijakan belanja daerah, kajian tematik OPD2 (sektoral seperti irigasi, pariwisata), juga OPD2 penghasil pendapatan perlu mendapatkan anggaran dan pelatihan2. Ada kebijakan efisiensi anggaran untuk 5 tahun ke depan. Perlu dikaji skema pembiayaan pilkada, pembiayaan dana petani dan nelayan.

SESI 2 :

- Bapak Arif (Camat Ayah) : Ada Program Unggulan ASN ngayomi, mohon untuk segera diimplementasikan
- Ibu Herniatun (Unimugo) :
 - a) Seiring kemajuan jaman , Kabupaten Kebumen berpotensi sebagai online shop
 - b) Terkait kondisi kemiskinan semoga disebabkan karena data yang belum jujur
 - c) Perlu adanya inovasi ramah lingkungan, himbauan karangan bunga diganti dengan bibit pohon/ uang.
 - d) Terkait Kosa Bangsa memang aturannya tidak boleh mengusulkan daerah asal
 - e) Dukungan pemerintah terhadap kasus beasiswa aspirasi untuk focus kampus di Kebumen, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh sekitar kampus
- Rektor IAINU :
 - a) Ucapan Terima Kasih telah dilibatkan dalam forum Bappeda

- b) Terkait penelitian dan pengembangan bias melibatkan dosen-dosen
- c) Perlunya meningkatkan kolaborasi kampus lokal.

SESI 3 :

- Ibu Ela (UMNU) :
 - a) Dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi Geopark, kecamatan mana yang menjadi prioritas mengingat keterbatasan dana, belum nyaman dan aman.
 - b) Perlunya revitalisasi satu data
 - c) Perlunya mengakomodir generasi gen z, yang kelihatannya nganggur tetapi kaya
- Bapak Kabul (Komite Ekraf) :
 - a) Perlunya data subsector ekokraf, karena belum ada support data utamanya pelaku ekokraf, sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
 - b) Pernah melakukan survey 116 pelaku batik, ternyata pendapatan hanya 1 juta sebulan
- Migran Care :
 - a) Progul Biyunge momong, mohon disinkronkan pada kondisi saat ini dimana masih banyaknya kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), padahal TK migran berkontribusi cukup besar (3000 orang x 5 Juta). Di samping itu anggaran terhadap perlindungan migran masih kurang.
 - b) Masih terjadi kekerasan , dimana kelemahannya adalah tidak adanya bukti fisik karena visum sudah hilang.
- Kecamatan Buayan
 - a) IKU kecamatan adalah pelayanan publik, namun support system pelayanan publik belum optimal.
 - b) Sarpras masih minim dan tidak representative, akan mempengaruhi nilai untuk perencanaan matang.
- Forum Anak
 - a) Anggaran forum anak masih tidak tepat sasaran
 - b) Program layak anak : pendidikan, kesehatan, ekonomi
 - c) Program anak bersama geopark : kerjasama geopark dan anak, bikin film geopark dan kegiatan anak berwirausaha.
 - d) Perlu adanya pelatihan usaha secara digital dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pendampingan bisnis inline, program start up untuk memasarkan kreatifitas anak, namun selama ini kurang wadah yang memadai. Perlu juga wiraswasta by website (barang dan jasa)
 - e) Semoga prioritas pembangunan berpihak ke anak sebagai pioneer pembangunan

#Tanggapan

- Kepala Bappeda : terkait semua masukan dan saran terhadap perencanaan pembangunan akan kami tindaklanjuti dengan perencanaan yang lebih baik.

4. Penyepakatan renstra dan renja Bappeda
5. Penyepakatan delegasi Bappeda untuk hadir pada Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD 2026
6. Penadatangan Berita Acara penyepakatan
7. Penutup

Notulen,



Hantari Mahadewi, SP

Perencana Ahli Muda





LAMPIRAN II : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029
NOMOR :
TANGGAL : 14 MARET 2025

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGIAT SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggungan Jawa	Lokasi				
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028				2029		2030	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp
				UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN				11.853.086.000	11.576.027.000	12.660.437.184	12.816.298.317	13.182.181.773							
				URUSAN PERENCANAAN	%	90	10.388.629.000	10.038.344.000	11.248.867.364	11.218.998.317	11.372.114.773	90							
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan		Indeks Kualitas Perencanaan			%	100			100										
	Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD dengan RPJPD			%	100	100	1.225.000.000	1.286.250.000	1.402.914.000	1.611.548.400	1.540.583.500	90	7.000.285.900		Kab. Kebumen			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			5.01.0 2.2.01 .0005	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2	3	4	920.000.000	4	946.000.000	4	1.066.451.000	6	1.258.472.400	4	1.169.852.500	4	5.380.875.900	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.01 .0005	Pelaksanaan Muatan/Program/Kegiatan/Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	4	2	370.000.000	2	388.500.000	2	407.925.000	3	571.106.400	2	448.117.500	2	2.185.848.900	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.01 .0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	2	550.000.000	2	577.500.000	2	658.726.000	3	687.366.000	2	771.735.000	2	3.195.327.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.525.000	2	243.102.000	2	1.105.127.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.02 .0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.525.000	2	243.102.000	2	1.105.127.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.763.000	1	121.551.000	1	127.629.000	1	560.183.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 2.2.03 .0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.763.000	1	121.551.000	1	127.629.000	1	560.183.000	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi									
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028				2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp					
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persen	100	100	100	0	974.246.000	100	0	982.935.000	100	0	1.082.081.000	100	0	1.293.686.483	100	0	1.190.188.787	5.483.135.250	Kab. Kebumen
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Urusan	21	21	21	422.069.000	21	443.174.000	21	465.331.000	21	538.598.333	21	524.713.317	21	2.413.885.650					Kab. Kebumen
			5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	2	2	184.786.000	2	194.026.000	2	203.726.000	2	213.912.893	2	235.304.183	2	1.031.795.078					Kab. Kebumen
			5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	2	2	137.283.000	2	144.168.000	2	151.355.000	2	228.922.440	2	167.857.134	2	828.565.574					Kab. Kebumen
			5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.763.000	1	121.552.000	1	562.565.000					Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Urusan	13	6	13	326.596.000	5	271.926.000	5	305.523.000	5	368.799.150	5	355.420.000	5	1.629.264.150		Kab. Kebumen
			5.01.0 3.2.02 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	2	220.000.000	2	160.000.000	2	188.000.000	2	176.400.000	2	225.220.000	2	969.620.000		Kab. Kebumen
			5.01.0 3.2.02 .0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	2	106.596.000	2	111.926.000	2	117.523.000	2	193.399.150	2	130.200.000	2	659.644.150		Kab. Kebumen
			5.01.0 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Urusan	7	7	7	225.561.000	7	267.835.000	7	281.227.000	7	365.389.000	7	310.033.450	7	1.449.985.450		Kab. Kebumen
			5.01.0 3.2.03 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	4	2	225.561.000	2	267.835.000	2	281.227.000	2	365.389.000	2	310.033.450	2	1.449.985.450		Kab. Kebumen
			5.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	10	8.189.300	10	7.769.100	10	8.790.800	10	8.314.700	10	8.641.300	10	41.706.500		Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah			
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
			5.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	11	10	60.039.000	10	63.042.000	10	66.186.787	11	68.506.827	10	72.981.869	10	331.764.483		Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	7	49.014.000	7	51.465.000	7	54.039.000	8	56.741.000	7	59.578.000	7	270.837.000		Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3	11.025.000	3	11.577.000	3	12.156.787	3	12.764.827	3	13.403.869	3	60.927.483		Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	6.112,272.000	6,337.439.000	6,571.081.082	6,813.458.056	7,064.967.058					32.899,197.168		Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	30	55	53	6.092,553.000	6,316.734.000	6,549.320.000	6,790.630.000	7,040.997.000	53	32.790,234.000						Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.02 .0003	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	4	6	19.719.000	20.705.000	21.741.062	22.828.056	23.970.058	6	108.963,168						Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.05	Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Orang	1	1	53	100.000.000	106.000.000	110.259.000	115.763.000	121.551.000	53	552.564.000						Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	43	43	53	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.763.000	121.551.000	53	552.564.000						Kab. Kebumen
			5.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	566.686.000	582.521.000	598.147.525	609.187.551	639.818.579	12	2.948,130.695						Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian 2024	Perk Iraan Capaian 2025	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			5.01.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	4	15.760.000	4	16.538.000	4	17.364.525	4	18.232.551	4	19.144.579	4	87.029.655	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	160.488.000	12	174.791.000	12	183.531.000	12	192.708.000	12	202.344.000	12	919.842.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Bulan	12	12	12	100.000.000	12	106.000.000	12	110.250.000	12	115.763.000	12	121.552.000	12	552.565.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Doku men	3	3	1	3.675.000	1	3.650.000	1	4.052.000	1	4.255.000	1	4.498.000	1	20.309.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material	Paket	3	3	3	20.793.000	3	21.833.000	3	22.825.000	3	24.072.000	3	25.276.000	3	114.899.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	233	235	23	210.000.000	23	220.500.000	23	231.525.000	23	243.102.000	23	255.267.000	23	1.160.384.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Doku men	1	1	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.577.000	1	83.102.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	8	8	21	546.026.000	11	191.828.000	8	217.918.000	1	134.314.000	1	141.030.000	1	1.231.113.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1 2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Paket	0	0	1	116.025.000	1	121.826.000	1	127.918.000	1	134.314.000	1	141.030.000	1	641.113.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1 2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	8	20	430.000.000	10	70.000.000	7	90.000.000					37	560.000.000	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/ KEGI/ SUBKEG	SATU AN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
			5.01.0 1.2.07.0007	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	1	390.000.000							1	390.000.000	Kab. Kebumen			
			5.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	215.811.000	12	226.393.000	12	237.714.000	12	249.600.000	12	262.082.000	12	1.191.400.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	4.410.000	12	4.631.000	12	4.863.000	12	5.106.000	12	5.362.000	12	24.372.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	101.850.000	12	106.943.000	12	112.391.000	12	117.906.000	12	123.802.000	12	562.792.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	109.351.000	12	114.819.000	12	120.560.000	12	126.568.000	12	132.918.000	12	604.236.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	49	49	50	668.760.000	50	292.938.000	50	1.007.586.000	50	322.865.000	50	308.114.000	50	2.661.363.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	36	49	105.000.000	49	110.250.000	49	115.763.000	49	121.561.000	49	127.629.000	49	580.193.000	Kab. Kebumen	
			5.01.0 1.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	12	49	78.750.000	49	82.008.000	49	86.823.000	49	91.164.000	49	95.722.000	49	435.147.000	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028				2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
			5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	405.000.000	1	100.000.000	1	805.000.000	1	110.250.000	1	115.783.000	1	1.536.013.000	Kab. Kebumen	
			URUSAN LITBANG						1.464.459.000		1.537.883.000		1.614.569.800		1.695.300.000		1.780.087.000		8.092.078.800	Kab. Kebumen	
Meningkatkan kapabilitas Inovasi daerah		IK : Kapabilitas Inovasi			Nilai			2,32		2,33		2,34		2,35		2,36		2,36	0	Kab. Kebumen	
	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan riset dan Inovasi daerah	IK : Indeks Inovasi Daerah			Inovasi														0	Kab. Kebumen	
			5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase	0	0	100	1.464.459.000	100	1.537.883.000	100	1.614.569.800	100	1.695.300.000	100	1.780.087.000	100	8.092.078.800	Kab. Kebumen	
			5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Dokumen	0	0	10	816.368.000	10	859.287.000	10	902.252.000	10	947.365.000	10	994.734.000	10	4.522.006.000	Kab. Kebumen	
			5.05.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	0	0	3	816.368.000	3	859.287.000	3	902.252.000	3	947.365.000	3	994.734.000	3	4.522.006.000	Kab. Kebumen	
			5.05.03.1.02	Inventarisasi dan Inovasi	Persentase	0	0	100	646.091.000	100	676.398.000	100	712.317.800	100	747.535.000	100	785.333.000	100	3.570.072.800	Kab. Kebumen	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KODE	PROGRAM/KEGI SUBKEG	SATUAN	Data Capaian pada Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian 2024	Perkiraan Capaian 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra perangkat Daerah			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
			5.05.0 3.1.02 .0025	Facilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Laporan	0	0	2	185.000.000	2	184.250.000	2	203.983.300	2	214.182.000	2	224.871.000	2	1.022.246.300	Kab. Kebumen	
			5.05.0 3.1.02 .0001	Facilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	0	0	2	308.833.000	2	324.275.000	2	340.489.500	2	357.514.000	2	375.390.000	2	1.706.501.500	Kab. Kebumen	
			5.05.0 3.1.02 .0008	Facilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan	0	0	2	152.258.000	2	159.871.000	2	167.885.000	2	176.259.000	2	185.072.000	2	841.325.000	Kab. Kebumen	

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen



Bahrun Munawir, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat II IV-b
NIP. 19860825 200412 1 002

LAMPIRAN III: REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN
FORUM RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN
KEBUMEN TERHADAP INDIKATOR
KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029
NOMOR :
TANGGAL : 14 MARET 2025

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Kebumen Terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase konsistensi program dan kegiatan RPJMD dengan RKPD	90	90	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Inovasi Daerah	-	-	Inovasi	Sangat Inovasi	Sangat Inovasi	Sangat Inovasi	Sangat Inovasi	Sangat Inovasi

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen



Bahrin Munawir, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV-b
NIP. 19860825 200412 1 002



**FORUM RENSTRA BAPPEDA
TAHUN 2025-2029
DAN
RENJA BAPPEDA TAHUN 2026**

Kebumen, 14 Maret 2025



@kabupatenkebumen



Bappeda Kebumen



bappeda@kebumen.go.id

Dasar Hukum

01

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

02

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

03

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

04

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

05

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui **Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021** tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

06

PERDA Kab Kebumen No. 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

07

PERDA Kab Kebumen No. 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

08

Surat Edaran Bupati Kebumen tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Petunjuk Pelaksanaan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD



1 PERSIAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra-PD

Orientasi mengenal Renstra-PD

Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra-PD

Penyilapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD

- Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- Dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

3 PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA-PD

- Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra-PD.
- Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
- Rancangan Renstra-PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

4 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH

Tujuan	untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra-PD.
Pelaksana	kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
Peserta	pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Waktu	dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD diterima.
Keluaran	berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir

5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA-PD

- Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra-PD menjadi Rancangan Akhir Renstra-PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- Rancangan akhir Renstra-PD disajikan dengan sistematika Rancangan Awal Renstra-PD.

6 PENETAPAN RENSTRA-PD

- Rancangan Akhir Renstra-PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala BAPPEDA untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan **Peraturan Kepala Daerah**.
- Rancangan Akhir Renstra-PD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- Renstra-PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.
- BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra-PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- **Penetapan Renstra-PD dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.**



EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Tujuan													
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi	64	65,18	101,84	67	65,49	97,74	69	66,11	95,81	71	67,54	96,12
Sasaran													
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	72,73	75	103,12	75	77,08	102,77	76	76	100	83,33	86,71	102,86

EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2024

Program	Indikator Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke				Capaian Tahun ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urutan Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan Urutan Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah	1.054.526.000	700.915.000	826.698.000	749.671.000	1.548.124.916	691.624.379	819.693.450	748.336.917	95,39%	94,67%	97,53%	96,82%
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koreksi Program RPJMD ke dalam RKPD	1.562.386.000	703.190.000	1.196.614.000	1.248.679.000	1.216.320.445	692.728.552	1.179.022.595	1.244.077.503	77,80%	98,52%	98,53%	99,08%
Program Penunjang Urutan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urutan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah	5.649.285.000	6.032.315.000	5.545.676.000	5.426.766.000	5.390.877.637	5.831.562.196	5.245.635.348	5.132.444.366	95,42%	95,10%	96,13%	94,54%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	670.822.000	462.067.000	462.039.000	621.685.000	667.419.100	457.022.350	475.689.611	919.362.233	99,40%	99,92%	99,69%	99,79%

EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Capaian Keuangan	96,69 %	95,90 %	98,16 %	96,32 %
Defiasi	3,31 %	4,10 %	1,80 %	3,68 %

ISU ISU STRATEGIS BAPPEDA



Rumusan Permasalahan

"Belum Optimalnya
Perencanaan ,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah"

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kualitas Perencanaan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan Belum optimalnya pencapaian sasaran, program dan kegiatan prioritas daerah Belum optimalnya dukungan satu data dalam proses perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal sebagai instrument pencapaian sasaran, program dan kegiatan prioritas ;
2	Belum optimalnya kapeblitas inovasi daerah	Belum optimalnya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah Belum optimalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Kebumen
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia Belum optimalnya penyediaan Gedung kantor serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Belum optimalnya penyediaan regulasi dan dokumen pendukung kinerja pelayanan Belum optimalnya dukungan anggaran pendukung kinerja pelayanan



VISI

"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman
Maju, Sejahtera, dan Berbudaya"

Misi 1
Penguatan keteknikan melalui pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkeadilan serta pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan

Misi 2
Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan

Misi 3
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Misi 4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi

Misi 5
Mewujudkan masyarakat yang damai, gembira, toleran atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat

PERANAN BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN VISI MISI BUPATI

MISI KE 4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi

PERANAN BAPPEDA DALAM PENCAPAIAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH

NO.	PROGRAM UNGGULAN	PERANAN BAPPEDA
1.	Biyunge Momong	Sebagai Koordinator/sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Menyusun dan menyiapkan draft Peraturan Bupati tentang Kriteria Data Kemiskinan Daerah Menyusun dan menyiapkan draft Keputusan Bupati Kebumen tentang Data Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bekerjasama dengan Instansi terkait penyusunan Kajian Snap Shot Kemiskinan Daerah
2.	Ngobrol dan Rembug Bareng	Melaksanakan Musrenbang Tematik dengan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen
3.	Muda Kreatif	Melaksanakan lomba kreativitas dan inovasi daerah yang melibatkan partisipasi kaum muda Melaksanakan lomba penulisan artikel yang melibatkan partisipasi Kaum Muda

PERANAN BAPPEDA DALAM PENCAPAIAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH

NO.	PROGRAM UNGGULAN	PERANAN BAPPEDA
4.	Lingkungan Bersih Lestari	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan Kawasan Geopark dalam hal pemberdayaan, edukasi dan Konservasi Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Geopark Kebumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Geopark Kebumen
5.	Plesir Bareng Biyunge	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan Kawasan Geopark dalam hal pemberdayaan, edukasi dan Konservasi Fasilitasi penyusunan Rencana Induk Geopark Kebumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Geopark Kebumen Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Geopark Kebumen dengan Pihak Ketiga

Implikasi DOKUMEN RTRW dengan tupoksi BAPPEDA

NO.	KETERLIBATAN BAPPEDA
1.	URUSAN LINGKUNGAN
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
2.	URUSAN ENERGI SDM
	Kajian Pembangunan Jaringan yang menyatukan Gas Bumi dan kumbang pengolahan – konsumen
	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif
	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM
	Kajian Pembangunan Embung Baru
	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPRM) Kabupaten
	Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
	Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADASPRAM)
4.	URUSAN GEOPARK
	Pengembangan Kawasan Keunikan Budaya dan Fasil
	Kajian Delimitasi Situs Geologi
	Kajian Pengembangan Geopark
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Geopark
5.	URUSAN KEBUDAYAAN
	Pengendalian Kegiatan Bud Daya Terbangun Pada Kawasan Cagar Budaya:
	• Benteng Van Der Wijck
	• DKT Gombong
	• SMPN 1 Prembun

NO.	KETERLIBATAN BAPPEDA
6.	URUSAN PERTANIAN
	Penetapan dan Perlindungan KP2B
	Pengajuan Aib Fungsi Lahan Pertanian
	Kajian Pengembangan Kawasan Minipadiri
7.	URUSAN INDUSTRI
	Pengembangan Kawasan Perindustrian Industri yang Ramah Lingkungan
8.	URUSAN PARAWISATA
	Pengembangan Pariwisata Budaya
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Ekonomi Kreatif
9.	URUSAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP2KPP)
	Strategi Sertifikasi Kabupaten (SK) Secara Bertahap
	Rencana Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPPK)
10.	URUSAN TATA RUANG
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
	Pengembangan Kawasan, Garis, dan Utilitas Penunjang Kawasan Strategis
	Pertumbuhan Ekonomi
	Penataan Kawasan Kota Puraka Gombong

Capaian Indikator TPB BAPPEDA Kabupaten Kebumen

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tercapai	Belum Tercapai	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Data	Total
1	BAPPEDA	2	5	0	1	8

Arah kebijakan dan rekomendasi Intervensi KLHS Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan Tupoksi BAPPEDA

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	REKOMENDASI INTERVENSI
1.	Belum optimalnya Penguatan Kemiskinan	Penguatan kemiskinan dan peningkatan distribusi kesejahteraan	Peningkatan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat miskin
2.	Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan Ekonomi melalui Sektor Industri Berbasis Riset	- Peningkatan anggaran riset untuk pembangunan ekonomi yang selaras dengan perkembangan IPTEK - Penguatan badan riset daerah dengan dukungan tenaga yang profesional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah - Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan riset

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT <<<<

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2025-2029 adalah :

1. TPB di Kebumen telah terpetakan sejak tahun 2015 sehingga dukungan Perangkat Daerah sangat besar dalam mewujudkan capaian TPB.
2. Dokumen RTRW telah tersusun tahun 2024 yang akan diikuti dengan dokumen RDTR yang lebih operational.
3. Telah disusun berbagai dokumen pendukung Geopark Kebumen

Faktor penghambat pelaksanaan RTRW dan KLHS dalam Renstra BAPPEDA adalah :

1. Perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan industri.
3. Kegiatan penambangan liar mineral bukan logam.
4. Masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

ISU STRATEGIS

1. Optimalisasi peran perencanaan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan
2. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah di sektor perencanaan
3. Peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui riset dan inovasi
4. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen secara inklusif dan berkelanjutan
5. Pengembangan Geopark Kebumen sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan

PERENCANAAN KE DEPAN



TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026-2030

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGE T 2027	TARG ET 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
TUJUAN 1						
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	90 %	90%	90 %	90 %	90%
SASARAN						
Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Presentase Konsistensi program dan kegiatan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
TUJUAN 2						
Meningkatnya kapabilitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36
SASARAN						
Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

PAGU PROGRAM BAPPEDA TAHUN 2025-2030

PROGRAM/KEGI/ SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK : Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90	1.248.727.000	90	1.225.000.000	90	1.206.250.000	90	1.402.914.000	90	1.611.548.400	90	1.540.583.500
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IK : Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Persen	100	897.741.000	100	974.246.000	100	982.935.000	100	1.052.081.000	100	1.293.698.483	100	1.190.186.767
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IK : Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8.863.612.000	100	8.188.383.000	100	7.769.159.000	100	8.790.872.364	100	8.314.783.434	100	8.641.344.506
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	IK : Persentase fasilitas riset dan inovasi daerah	Persentase	83,31	270.368.000	100	1.464.458.000	100	1.537.883.000	100	1.614.568.800	100	1.695.300.000	100	1.780.067.000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM/KEGI/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK : Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90	1.225.000.000	90	1.206.250.000	90	1.402.914.000	90	1.611.548.400	90	1.540.583.500
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	IK : Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundang	Dokumen	4	800.000.000	4	906.000.000	4	1.066.681.000	4	1.388.475.400	4	1.169.982.900
Subkeg : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	370.000.000	2	386.500.000	2	407.825.000	3	571.109.400	2	448.117.500
Subkeg : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	550.000.000	3	577.500.000	2	658.726.000	3	687.366.000	2	721.735.000
Kegiatan Analisis Data dan Informasi	IK : Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	200.000.000	2	215.000.000	2	220.500.000	2	231.826.000	2	243.102.000
Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Subkeg : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	200.000.000	2	210.000.000	2	220.500.000	2	231.826.000	2	243.102.000
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	IK : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	105.000.000	1	110.250.000	1	116.783.000	1	121.661.000	1	127.629.000
Subkeg : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	105.000.000	1	110.250.000	1	116.783.000	1	121.661.000	1	127.629.000

PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IK : Cakupan Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Persen	100	974.246.000	100	982.926.000	100	1.062.081.000	100	1.293.886.483	100	1.190.196.787
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK : Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Urusan	21	422.068.000	21	445.174.000	21	488.321.000	21	558.898.333	21	624.713.217
Subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	164.796.000	2	164.020.000	2	203.726.000	2	213.912.863	2	235.304.183
Subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	137.263.000	2	144.146.000	2	151.355.000	2	228.922.440	2	267.857.134
Subkeg. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	116.763.000	1	121.582.000

PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SOA (Sumber Daya Alam)	IK : Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perencanaan dan SOA (Sumber Daya Alam)	Urusan	13	326.696.000	13	271.926.000	13	305.823.000	13	368.796.160	13	366.420.000
Subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	200.000.000	2	160.000.000	2	188.000.000	2	176.400.000	2	225.226.000
Subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SOA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SOA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	106.696.000	2	111.926.000	2	117.823.000	2	192.396.160	2	130.200.000
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK : Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Terusun	Urusan	7	325.681.000	7	267.836.000	7	281.227.000	7	365.288.000	7	310.953.450
Subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	325.681.000	2	267.836.000	2	281.227.000	2	365.288.000	2	310.953.450

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/ KEGI/ SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IK: Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	9.908.844.000	100	9.002.441.000	100	11.569.071.364	100	9.848.028.434	100	10.340.430.505
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IK: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	60.039.000	10	83.042.000	10	66.195.787	11	69.905.827	10	72.981.869
Subkeg: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	49.014.000	7	51.465.000	7	54.030.000	8	56.741.000	7	59.578.000
Subkeg: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	11.025.000	3	11.577.000	3	12.156.787	3	12.764.827	3	13.403.869
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IK: Jumlah bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	6.662.233.000	12	6.994.845.000	12	7.334.090.062	12	7.700.793.056	12	8.086.934.088
Subkeg: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IK: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	53	6.632.514.000	53	6.964.140.000	53	7.312.347.000	53	7.677.965.000	53	8.061.864.000
Subkeg: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	8	19.719.000	8	20.705.000	8	21.741.062	8	22.828.056	8	23.970.058

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/ KEGI/ SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IK: Jumlah orang yang mengikuti diklat	Orang	83	100.000.000	83	105.000.000	83	110.260.000	83	115.763.000	83	121.561.000
Subkeg: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IK: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	53	100.000.000	53	105.000.000	53	110.260.000	53	115.763.000	53	121.561.000
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	IK: Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	566.895.000	12	562.821.000	12	586.147.835	12	609.167.651	12	639.618.879
Subkeg: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IK: Jumlah Paket Komponen Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.750.000	4	16.538.000	4	17.364.525	4	18.232.551	4	19.144.579
Subkeg: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	186.468.000	12	174.791.000	12	183.531.000	12	192.708.000	12	202.344.000
Subkeg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IK: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.260.000	12	115.763.000	12	121.562.000
Subkeg: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IK: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.675.000	1	3.859.000	1	4.052.000	1	4.255.000	1	4.468.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
Subkeg: Penyediaan Bahan/Material	IK: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	20.793.000	3	21.833.000	3	22.925.000	3	24.072.000	3	25.278.000
Subkeg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IK: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	235	210.000.000	235	220.500.000	235	231.525.000	235	243.102.000	235	255.257.000
Subkeg: Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	IK: Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.577.000
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IK: Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	21	546.025.000	11	191.826.000	8	217.918.000	1	134.314.000	1	141.030.000
Subkeg: Pengadaan Mebel	IK: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	116.025.000	1	121.826.000	1	127.918.000	1	134.314.000	1	141.030.000
Subkeg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	430.000.000	10	70.000.000	7	90.000.000				
Subkegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IK: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1	360.000.000						

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
Keg: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK: Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	218.611.000	12	226.362.000	12	237.714.000	12	249.666.000	12	262.082.000
Subkeg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	4.410.000	12	4.631.000	12	4.863.000	12	5.106.000	12	5.362.000
Subkeg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	101.650.000	12	106.943.000	12	112.291.000	12	117.906.000	12	123.802.000
Subkeg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	136.351.000	12	144.619.000	12	150.560.000	12	156.586.000	12	162.918.000
Keg: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK: Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	60	686.750.000	60	792.938.000	60	1.007.606.000	60	1.222.866.000	60	1.449.114.000
Subkeg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	IK: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	49	105.000.000	49	110.250.000	49	115.763.000	49	121.551.000	49	127.629.000
Subkeg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	49	78.750.000	49	82.698.000	49	86.823.000	49	91.164.000	49	95.722.000
Subkeg: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	405.000.000	1	100.000.000	1	805.000.000	1	110.250.000	1	116.763.000

PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH										
PROGRAM/ KEGI/ SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029	
			IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN	IK	ANGGARAN
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	IK : Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	Persentase	100	1.464.459.000	100	1.537.693.000	100	1.614.569.000	100	1.696.300.000
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	IK : Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Dokumen	10	818.368.000	10	859.287.000	10	902.252.000	12	947.365.000
Subkeg : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	IK : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	3	618.368.000	3	659.287.000	3	902.252.000	3	947.365.000
Kegiatan Inovasi dan Inovasi	IK : Persentase fasilitasi pengembangan inovasi dan inovasi	Persentase	100	646.091.000	100	678.396.000	100	712.317.000	100	747.936.000
Subkeg : Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	IK : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	2	185.000.000	2	194.250.000	2	203.963.300	2	214.162.000
Subkeg : Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	IK : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Laporan	2	308.833.000	2	324.275.000	2	340.489.500	2	357.514.000
Subkeg : Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	IK : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan	2	152.256.000	2	159.871.000	2	167.865.000	2	176.258.000

